



PEMERINTAH  
KOTA JAMBI

# 2021

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA JAMBI



**Dr. H. SYARIF FASHA, MEd**  
WALIKOTA JAMBI

**Dr. dr. H. MAULANA, MKM**  
WAKIL WALIKOTA JAMBI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	LATAR BELAKANG	
1.1.1	PENJELASAN UMUM	
a.	Undang-undang Pembentukan Daerah .....	1
b.	Geografisi Wilayah .....	2
c.	Jumlah Penduduk .....	4
d.	Jumlah Kecamatan dan desa Kelurahan .....	4
e.	Jumlah Perangkat Daerah ,unit Kerja Perangkat Daerah .....	7
f.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	10
1.1.2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
a.	Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	35
b.	Visi dan Misi Kepala Daerah .....	36
c.	Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah .....	38
d.	Kegiatan Pembangunan Daerah.....	43
1.1.3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	50

### **BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH**

2.1	Capaian Kinerja Makro .....	51
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan.....	51
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	51
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	82
2.2.5	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	89
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
a.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	90
b.	Pengukuran Capaian Kinerja di dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja .....	91
c.	Pengukuran Capaian Kinerja di dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ..	94
d.	Pengukuran Capaian Kinerja di dibandingkan dengan Target dalam Menengah.....	94
e.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan hasil kinerja yang di capai.....	95
f.	Analisi Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja .....	95

### **BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN**

#### **BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN**

4.1	URUSAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN	
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	97
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	98
4.1.3	Realisasi.....	98
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	107
4.1.5	Dukungan Personil.....	108
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	111
4.2	URUSAN PEKERJAAN UMUM	
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	111
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	112
4.2.3	Realisasi.....	112

4.2.4 Alokasi Anggaran .....	114
4.2.5 Dukungan Personil .....	117
4.2.6 Permasalahan dan Solusi .....	118
<b>4.3 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	119
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	119
4.3.3 Realisasi .....	120
4.3.4 Alokasi Anggaran .....	121
4.3.5 Dukungan Personil .....	122
4.3.6 Permasalahan dan Solusi .....	123
<b>4.4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
(a) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	125
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	126
4.4.3 Realisasi .....	129
4.4.4 Alokasi Anggaran .....	133
4.4.5 Dukungan Personil .....	136
4.4.6 Permasalahan dan Solusi .....	139
(b) Satuan Polisi Pamong Praja	
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	140
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	141
4.4.3 Realisasi .....	141
4.4.4 Alokasi Anggaran .....	142
4.4.5 Dukungan Personil .....	145
4.4.6 Permasalahan dan Solusi .....	
<b>4.5 URUSAN SOSIAL</b>	
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	146
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	146
4.5.3 Realisasi .....	147
4.5.4 Alokasi Anggaran .....	149
4.5.5 Dukungan Personil .....	150
4.5.6 Permasalahan dan Solusi .....	151
<b>4.6 URUSAN KESEHATAN</b>	
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	153
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	153
4.6.3 Realisasi .....	154
4.6.4 Alokasi Anggaran .....	156
4.6.5 Dukungan Personil .....	156
4.6.6 Permasalahan dan Solusi .....	157
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	158

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2021 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) dimana Bupati/Walikota Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana maksud Pasal 69 Ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2021 merupakan laporan berkala setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Jambi berdasarkan (RPJMD) Tahun 2021 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui capaian Pemerinta Kota Jambi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2021. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintahan Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Jambi,      Maret 2022



DR. H. SYARIF FASHA ME

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 PENJELASAN UMUM

##### A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jjambi dan Riau;
4. UU No. 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

##### B. Data Geografis Wilayah

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41' Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM<sup>2</sup>atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas

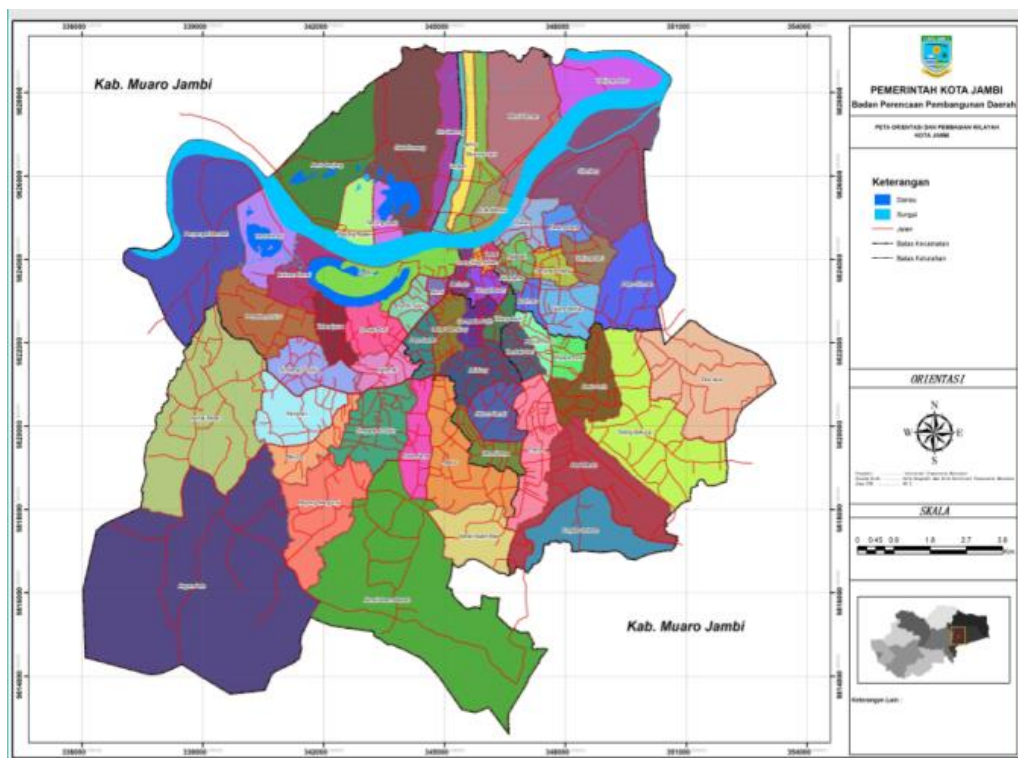
175,53 KM<sup>2</sup>. Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
<b>Jumlah</b>		<b>175,53</b>	<b>100</b>	<b>62</b>

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



**Gambar 2.1.**

Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

### C. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan data dari GIS Kota Jambi tercatat sebanyak 621.365 jiwa. Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat di bawah ini.

Tabel penduduk Kota Jambi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	312.307
2	Perempuan	309.058
<b>Total</b>		<b>621.365</b>

Sumber Data GIS Kota Jambi Tahun 2021

### D. Jumlah Kecamatan dan desa/ kelurahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Kecamatan Kota Baru	a) Kelurahan Suka Karya b) Kelurahan Simpang III Sipin c) Kelurahan Paal V (Lima) d) Kelurahan Kenali Asam Bawah e) Kelurahan Kenali Asam Atas
2	Kecamatan Telanaipura	a) Kelurahan Simpang IV (Empat) Sipin b) Kelurahan Buluran Kenali c) Kelurahan Teluk Kenali d) Kelurahan Penyengat Rendah e) Kelurahan Pematang Sulur
3	Kecamatan Jelutung	a) Kelurahan Jelutung b) Kelurahan Kebun Handil c) Kelurahan Cempaka Putih d) Kelurahan Talang Jauh e) Kelurahan Lebak Bandung f) Kelurahan Payo Lebar g) Kelurahan Handil Jaya

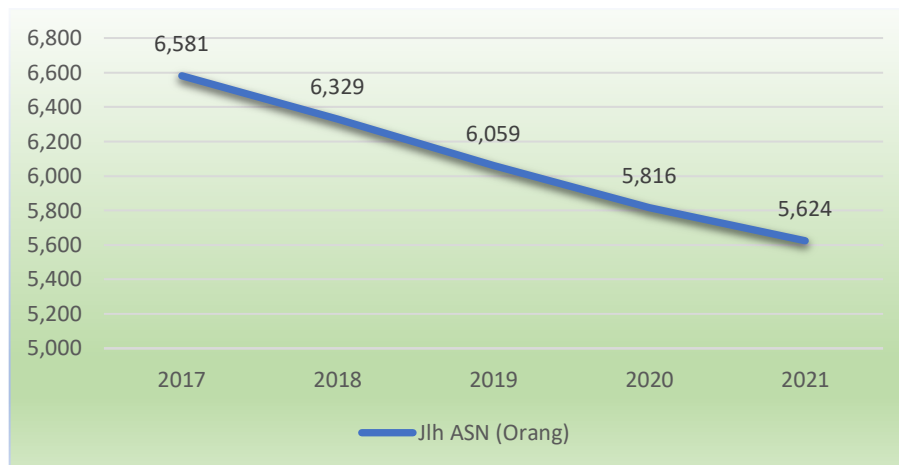
4	<b>Kecamatan Pasar Jambi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Pasar Jambi</li> <li>b) Kelurahan Beringin</li> <li>c) Kelurahan Sungai Asam</li> <li>d) Kelurahan Orang Kayo Hitam</li> </ul>
5.	<b>Kecamatan Jambi Selatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Pasir Putih</li> <li>b) Kelurahan Tambak Sari</li> <li>c) Kelurahan The Hok</li> <li>d) Kelurahan Wijaya Pura</li> <li>e) Kelurahan Pakuan Baru</li> </ul>
6.	<b>Kecamatan Danau Teluk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Pasir Panjang</li> <li>b) Kelurahan Tanjung Raden</li> <li>c) Kelurahan Olak Kemang</li> <li>d) Kelurahan Tanjung Pasir</li> <li>e) Kelurahan Ulu Gedong</li> </ul>
7.	<b>Kecamatan Jambi Timur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Sijenjang</li> <li>b) Kelurahan Kasang Jaya</li> <li>c) Kelurahan Talang Banjar</li> <li>d) Kelurahan Budiman</li> <li>e) Kelurahan Sulanjana</li> <li>f) Kelurahan Kasang</li> <li>g) Kelurahan Tanjung Sari</li> <li>h) Kelurahan Rajawali</li> <li>i) Kelurahan Tanjung Pinang</li> </ul>
8.	<b>Kecamatan Pelayangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Arab Melayu</li> <li>b) Kelurahan Mudung Laut</li> <li>c) Kelurahan Tengah</li> <li>d) Kelurahan Tahtul Yaman</li> <li>e) Kelurahan Jelmu</li> <li>f) Kelurahan Tanjung Johor</li> </ul>



9.	<b>Kecamatan Alam Barajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Bagan Pete</li> <li>b) Kelurahan Kenali Besar</li> <li>c) Kelurahan Rawasari</li> <li>d) Kelurahan Beliung</li> <li>e) Kelurahan Mayang Mangurai</li> </ul>
10.	<b>Kecamatan Danau Sipin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Legok</li> <li>b) Kelurahan Sungai Putri</li> <li>c) Kelurahan Murni</li> <li>d) Kelurahan Solok Sipin</li> <li>e) Kelurahan Selamat</li> </ul>
11.	<b>Kecamatan Paal Merah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Talang Bakung</li> <li>b) Kelurahan Payo Selincah</li> <li>c) Kelurahan Eka Jaya</li> <li>d) Kelurahan Lingkar Selatan</li> <li>e) Kelurahan Paal Merah</li> </ul>

## **E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi per Desember 2021 adalah sebanyak 5.624 orang. Jumlah ASN sejak tahun 2017 cenderung menurun dikarenakan banyak ASN yang pensiun dan rekrutmen ASN baru tidak lebih banyak dari ASN yang pensiun. Berikut ditampilkan gambar jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2017-2021.

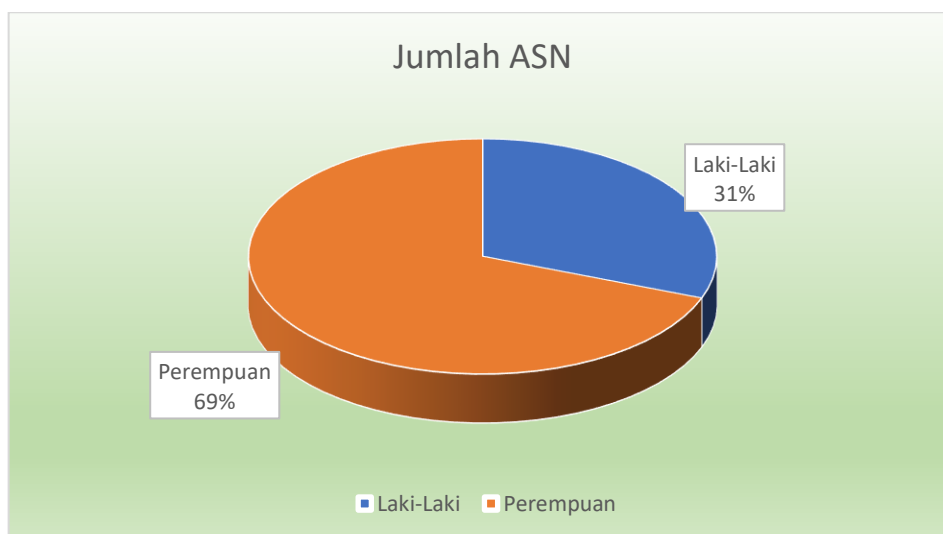


*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2017-2021.*

Jika dilihat komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin dan eselon

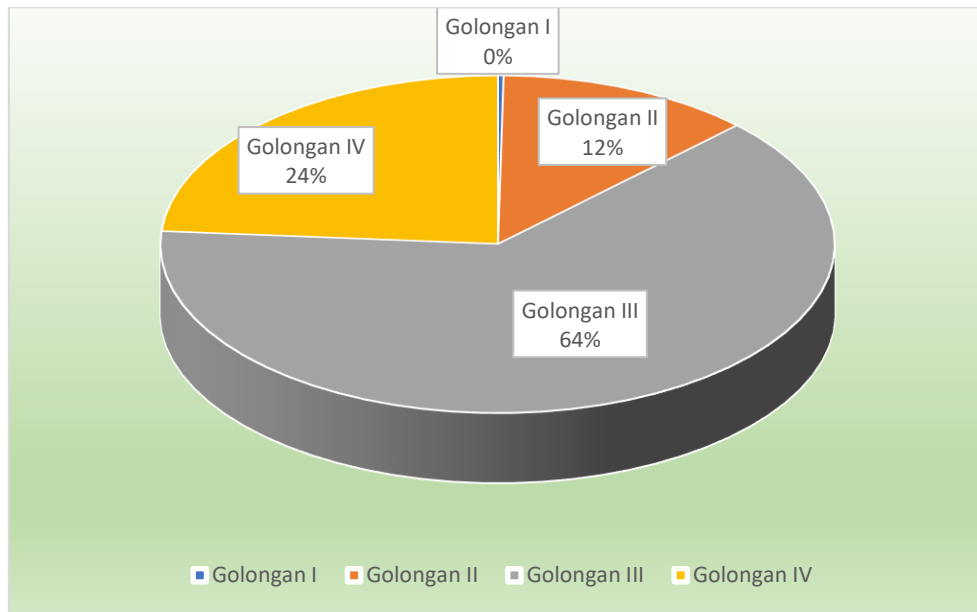
Unit Kerja	Eselon	LK	PR	Jumlah	Jumlah	
Pemerintah Kota Jambi	I	A	-	-	-	-
		B	-	-	-	
	II	A	1	-	1	32
		B	23	8	31	
	III	A	41	10	51	158
		B	74	33	107	
	IV	A	299	240	539	804
		B	116	149	265	
Jumlah					994	

Untuk melihat komposisi ASN laki-laki dan perempuan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



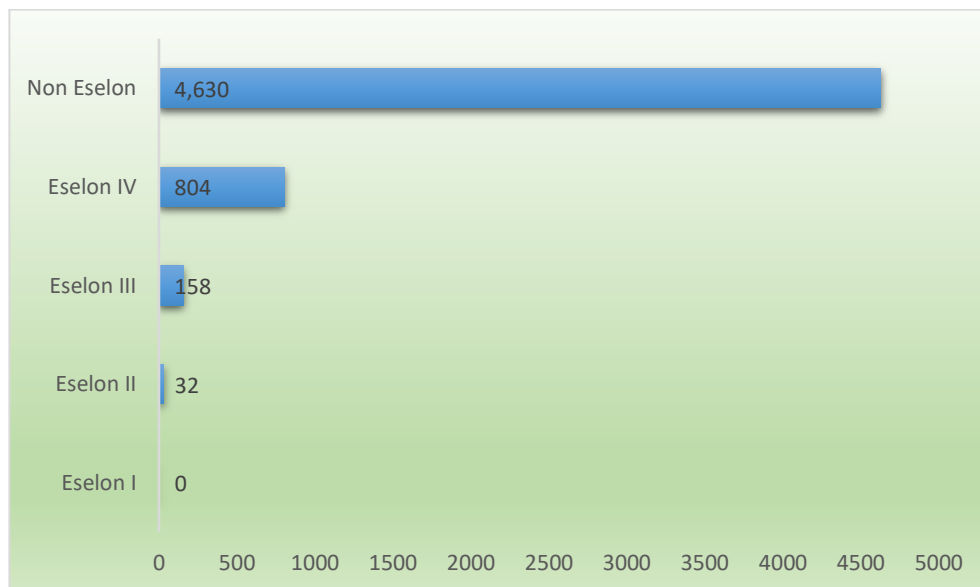
*Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2021*

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2021 berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



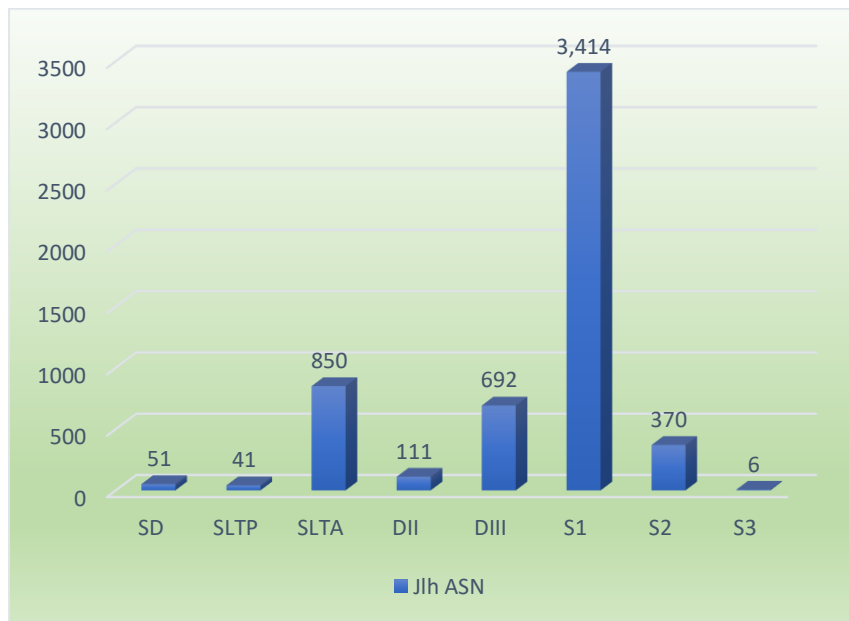
*Jumlah ASN berdasarkan Golongan 2021.*

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2021 berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2021 berdasarkan Eselon*

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan*

## F. Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.658.405.928.034,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.652.119.462.753,46 (99,62%).

Sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017
2.	BPHTB	Perda No. 5 Tahun 2019
3.	Pajak Daerah	Perda No. 6 Tahun 2019
4.	PBB	Perda No. 4 Tahun 2019
5.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 7 Tahun 2020
6.	Retribusi Jasa Umum	Perda No. 6 Tahun 2020

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah;
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari:

- Hasil Pajak Daerah;
- Hasil Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2021 mencapai Rp.382.475.416.958,64 atau 84,25% dari target penerimaan sebesar Rp.454.001.834.233,00 dan memberikan kontribusi sebesar 27,38% terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2020, yakni sebesar

Rp.355.674.818.034,49, maka PAD Tahun 2021 meningkat 7,54% atau naik sebesar Rp.26.800.598.924,15.

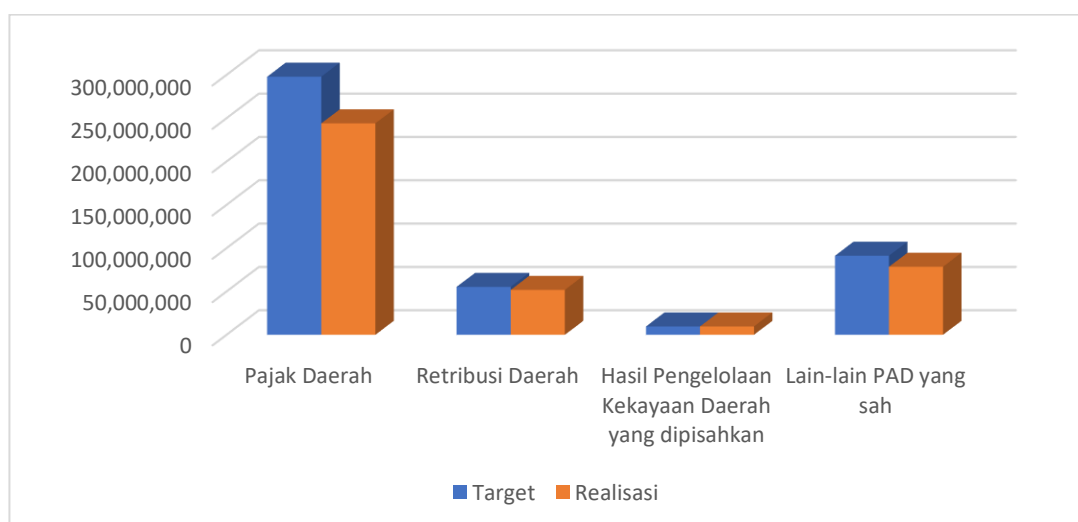
Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi PAD Tahun 2021.

**Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2021 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian	Realisasi 2020 (000)	Target 2021 (000)	Realisasi 2021 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	216.961.981,3	297.860.000	244.016.777,5	81,92%
2.	Retribusi Daerah	40.479.596,1	55.312.900	51.844.265,4	93,73%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.602.267,4	9.602.267,4	9.638.772,8	100,38%
4.	Lain-lain PAD yang sah	88.630.973,2	91.226.666,9	78.507.749,3	86,06%
<b>TOTAL</b>		<b>355.674.818</b>	<b>454.001.834,2</b>	<b>384.007.565,1</b>	<b>84,58%</b>

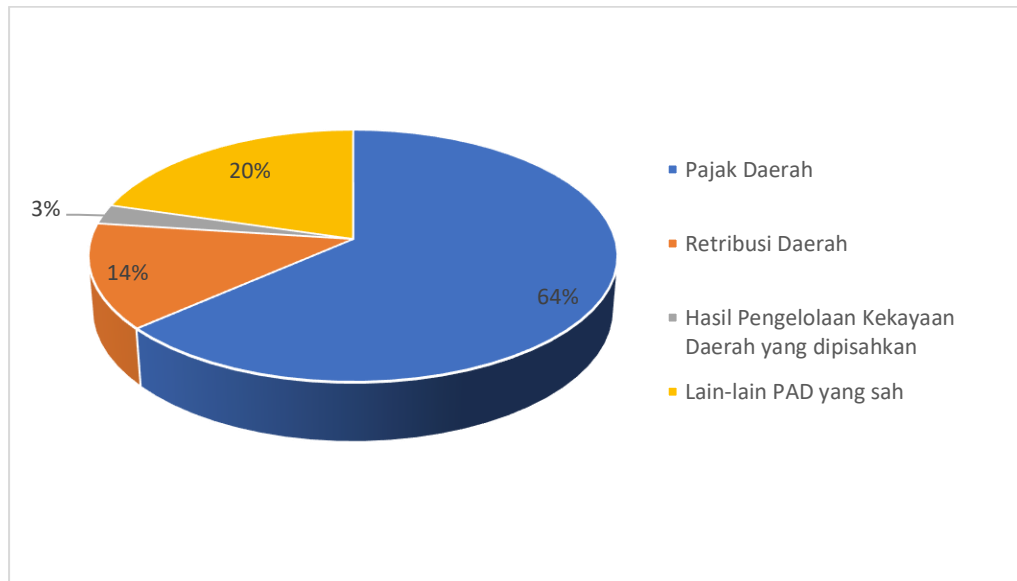
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 297.860.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.244.016.777.518,00 atau 81,92%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp.55.312.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 51.844.265.427,60 atau 93,73%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.9.602.267.383,00 terealisasi sebesar Rp.9.638.772.829,50 atau 100,38%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.91.226.666.850,00 terealisasi sebesar Rp. 78.507.749.295,36 atau 86,06%.

Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2021.



*Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2021*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2021*

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp.1.143.179.543.801,00 dan realisasinya mencapai Rp.1.206.026.802.746,00 atau 105,50%. Tabel berikut menunjukkan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2021.

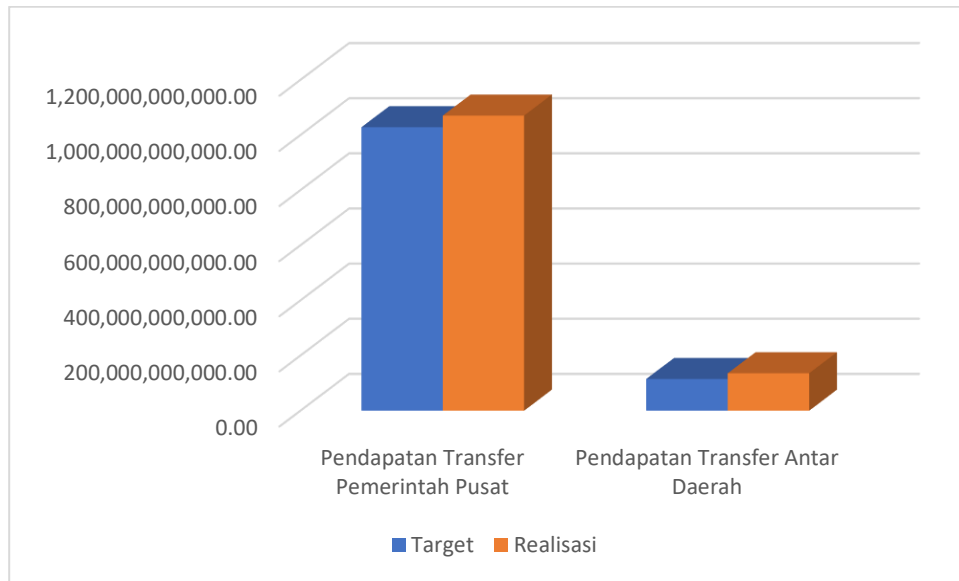
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian	Realisasi 2020 (000)	Target 2021 (000)	Realisasi 2021 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.036.458.974,8	1.028.242.964,1	1.070.421.415,8	104,10
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	114.936.579,7	135.605.387,0	117,98
<b>TOTAL</b>		<b>1.036.458.974,8</b>	<b>1.143.179.543,8</b>	<b>1.206.026.802,7</b>	<b>105,50</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

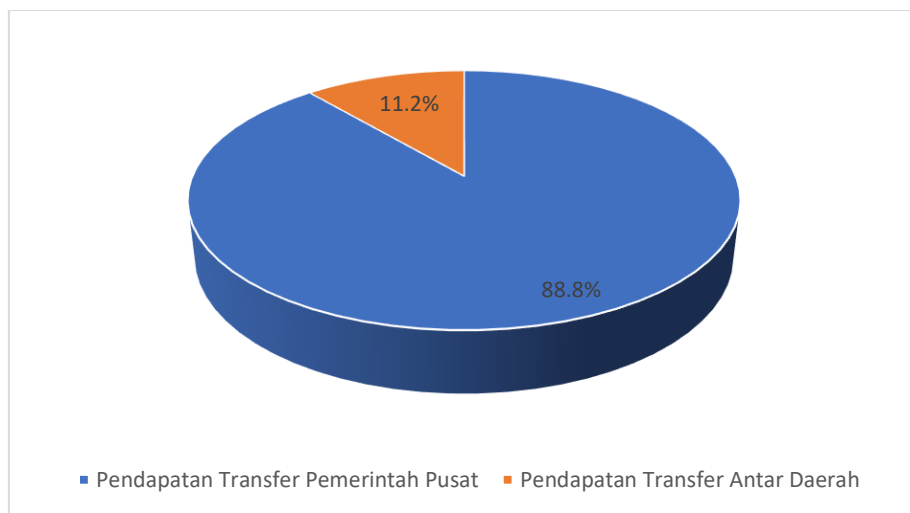
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp.1.028.242.964.108,00 realisasinya mencapai Rp.1.070.421.415.791,00 atau 104,10%. Target pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.114.936.579.693,00 terealisasi sebesar Rp.135.605.386.955,00 atau 117,98%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021.



*Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021*

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.61.224.550.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.085.094.937,00 atau 101,41%. Tabel berikut menunjukkan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021.

**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021**



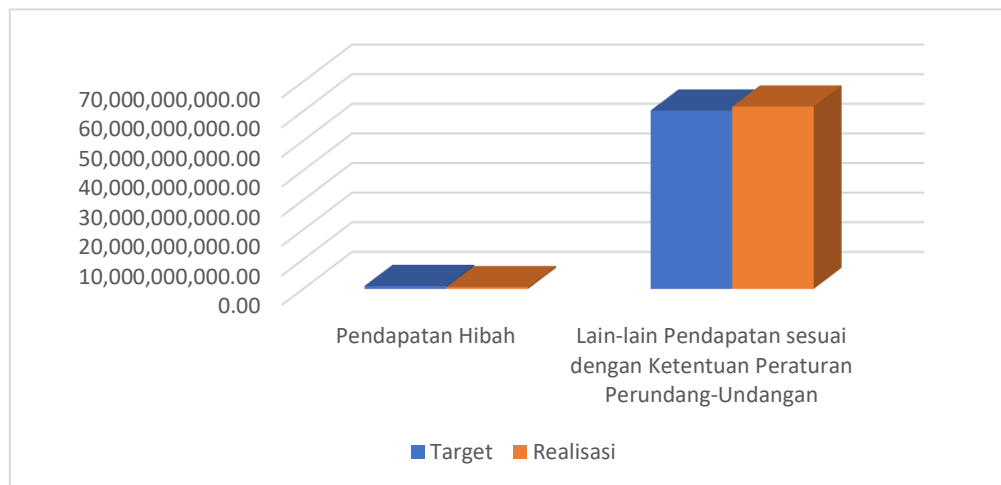
(Sebelum audit BPK-RI)

No	Uraian	Realisasi 2020 (000)	Target 2021 (000)	Realisasi 2021 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	167.230.765,9	1.000.000	597.000	59,70
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.462.716,6	60.224.550	61.488.094,9	102,10
<b>TOTAL</b>		<b>229.639.482,5</b>	<b>61.224.550</b>	<b>62.085.094.9</b>	<b>101,41</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.597.000.000,00 atau 59,7%. Target penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.60.224.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.61.488.094.937,00 atau 102,10%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021.



Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021 disajikan pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021*

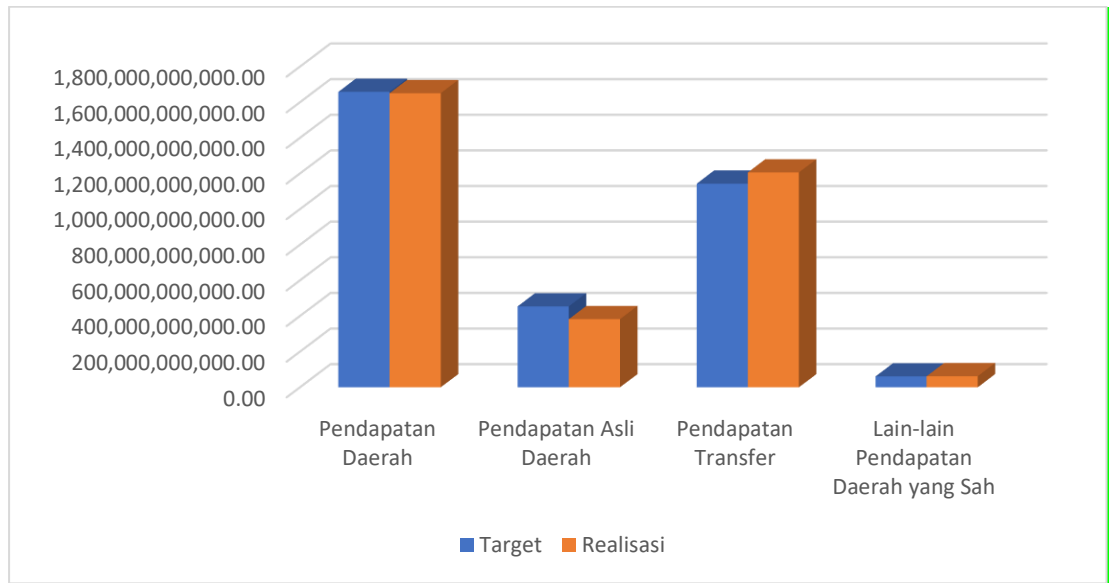
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021 adalah Rp. 1.650.659.558.330,64 atau terealisasi 99,53% dari target sebesar Rp. 1.658.405.928.034,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2021 (Sebelum audit BPK-RI)**

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	454.001.834.233,00	382.475.416.958,64	84,25
2	Pendapatan Transfer	1.143.179.543.801,00	1.206.026.802.746,00	105,50
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.224.550.000,00	62.157.338.626,00	101,52
	<b>Total</b>	<b>1.658.405.928.034,00</b>	<b>1.650.659.558.330,64</b>	<b>99,53</b>

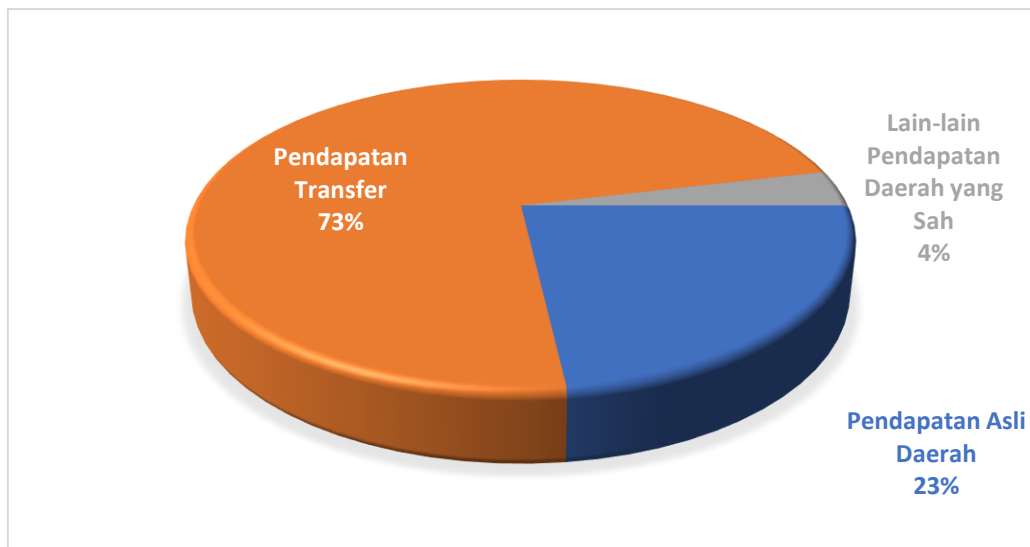
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021.



*Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021*

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 23% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73% dan sisanya sebesar 4% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat

menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.961.694.919.058,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.739.882.660.537,79 (88,69%) yang terdiri dari:

- Belanja Operasi
- Belanja Modal; dan
- Belanja Tidak Terduga.

Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.

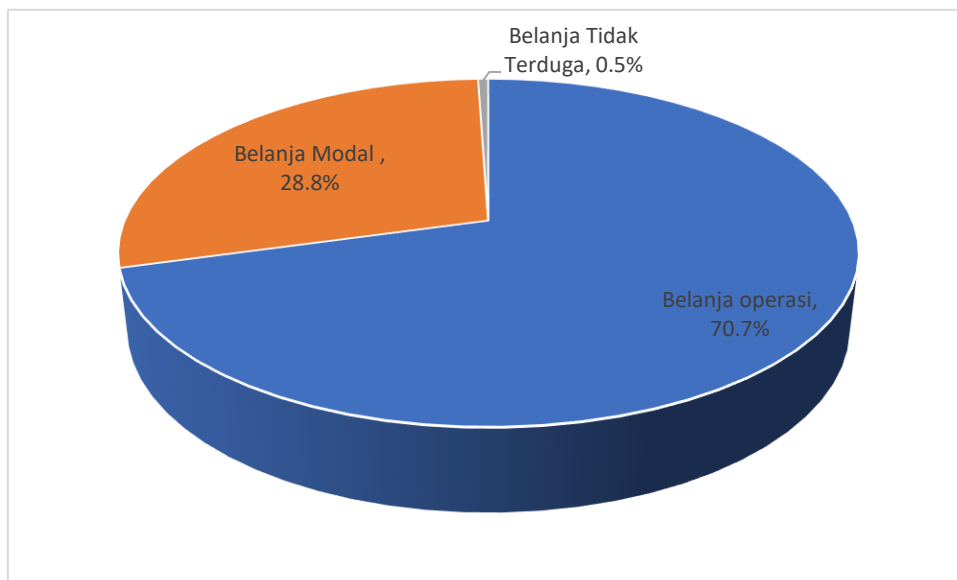
**Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian	Realisasi 2020 (000)	Target 2021 (000)	Realisasi 2021 (000)	% Realisasi
1.	Belanja Operasi	1.182.319.510,2	1.386.624.681,3	1.238.970.868,4	89,35
2.	Belanja Modal	444.351.878,2	564.655.003,9	495.849.289,0	87,81
3	Belanja Tidak Terduga	41.044.082,1	10.415.233,8	5.062.503,1	48,61
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.661.363.804,1</b>	<b>1.828.835.334</b>	<b>1.638.511.401,9</b>	<b>88,69</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target Belanja operasi adalah sebesar Rp.1.386.624.681.294,00 terealisasi sebesar Rp.1.238.970.868.427,85 atau 89,35%. Target Belanja Modal pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.564.655.003.939,00 terealisasi sebesar Rp.495.849.288.990,94 atau 87,81%. Target Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.10.415.233.825,00 terealisasi sebesar Rp.5.062.503.119,00 atau 48,61%.

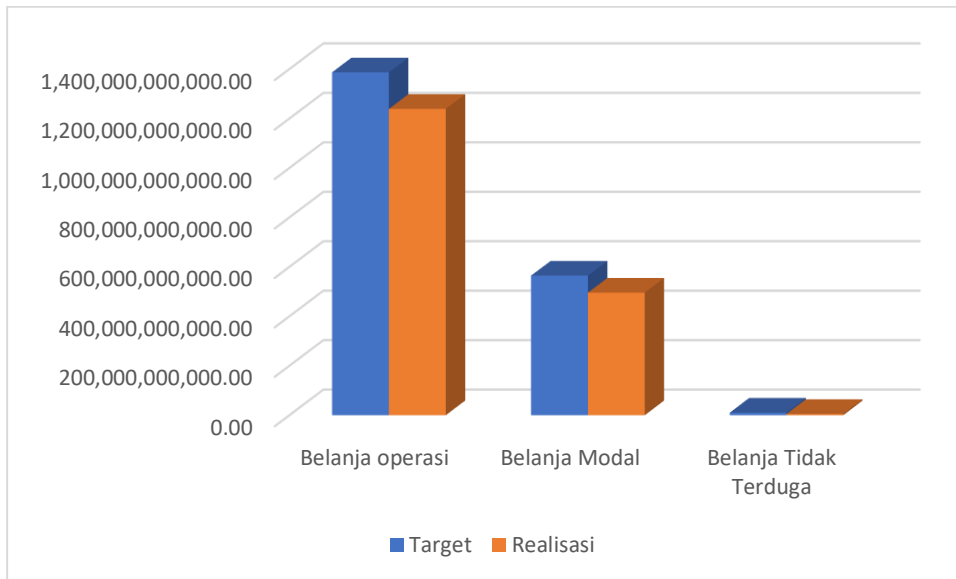
Untuk melihat komposisi besaran belanja daerah Kota Jambi TA 2021, seperti pada gambar di bawah ini.



*Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2021*

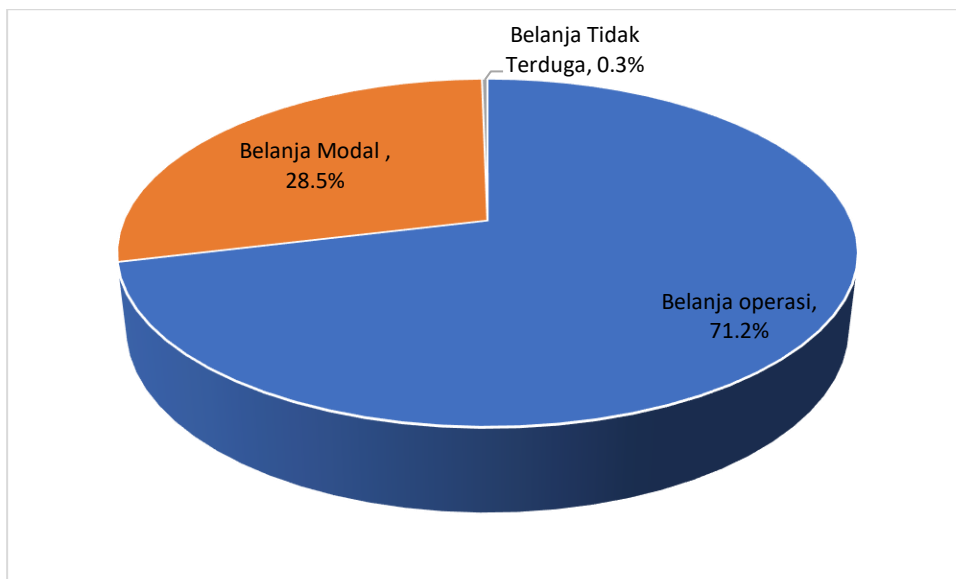
Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar 70,7%. Sedangkan Belanja modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar 28,8% dan belanja tidak terduga sebesar 0,5%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021.



*Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021*

### **Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.386.624.681.294,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.238.970.868.427,85 atau 89,35% dengan rincian pada tabel berikut.

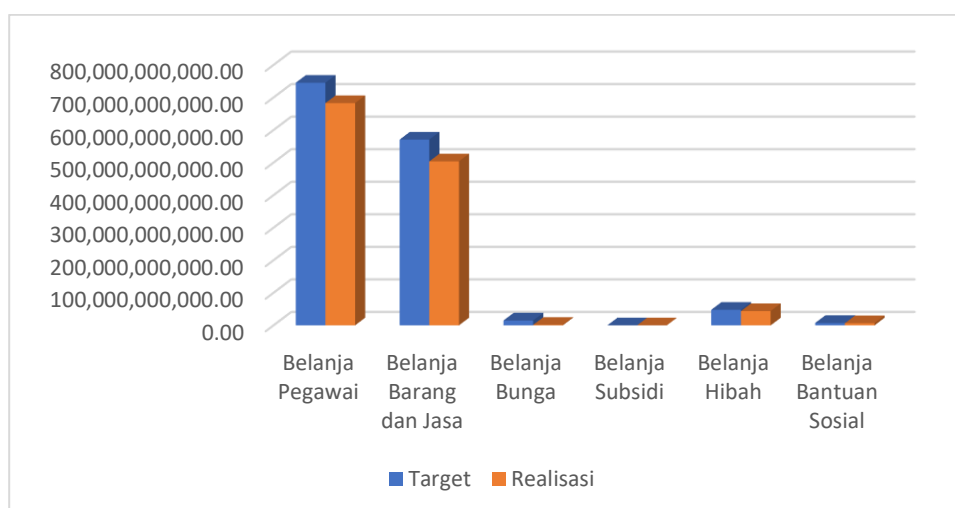
**Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2021 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	745.496.712.557,00	682.947.098.349,00	91,61
2.	Belanja Barang dan Jasa	570.707.987.311,00	503.718.512.594,85	88,26
3.	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
4.	Belanja Subsidi	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
5.	Belanja Hibah	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46
6.	Belanja Bantuan Sosial	7.287.353.850,00	6.637.634.682,00	91,08
<b>Total Belanja Operasi</b>		<b>1.386.624.681.294,00</b>	<b>1.238.970.868.427,85</b>	<b>89,35</b>

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.745.496.12.557,00 terealisasi sebesar Rp.682.947.098.349,00 atau 91,61%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.570.707.987.311,00 terealisasi sebesar Rp.503.718.512.594,85,00 atau 88,26%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.15.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.626.646.569,00 atau 10,84%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp.197.820.000,00 terealisasi sebesar Rp. 197.820.000,00 atau 100%. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.47.934.807.576,00 terealisasi sebesar Rp.43.843.156.233,00 atau 91,46%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.7.287.353.850,00 terealisasi sebesar Rp.6.637.634.682,00 atau 91,08%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2021.



**Gambar 1.19**  
*Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2021*

**Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.564.655.003.939,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.495.849.288.990,94 atau 87,81%. Adapun perincian Belanja modal pada T.A. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2021 (Sebelum audit BPK RI)**

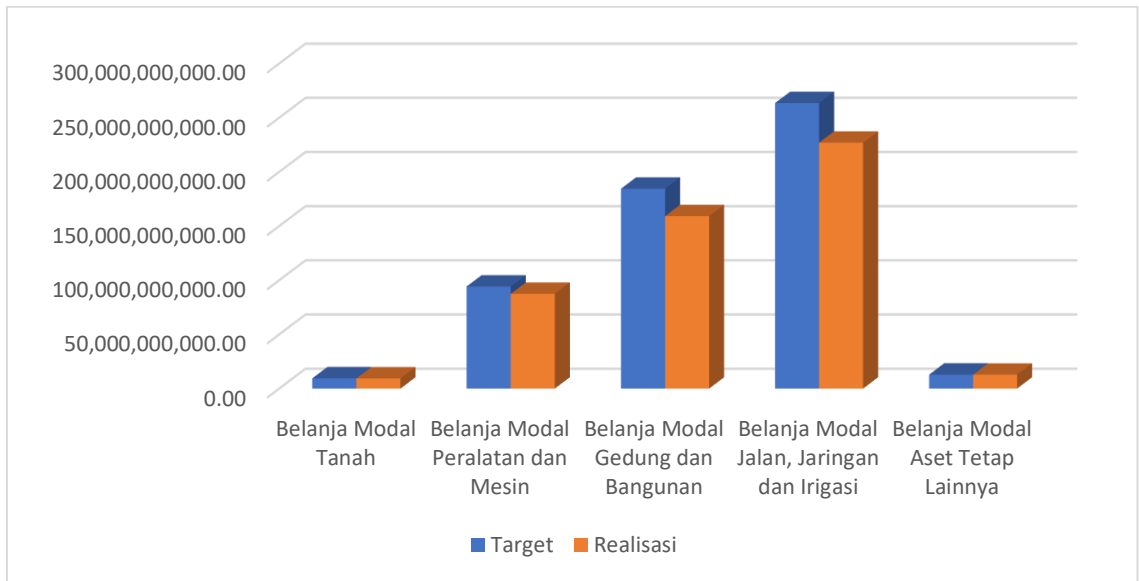
No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	9.485.000.000,00	9.426.780.000,00	99,39
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.214.356.428,00	87.447.727.435,00	92,82
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.496.593.464,00	159.133.484.114,94	86,25
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	263.570.339.074,00	226.986.232.364,00	86,12
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.888.714.973,00	12.855.065.077,00	99,74
<b>Total Belanja Modal</b>		564.655.003.939,00	495.849.288.990,94	87,81

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 anggaran Belanja Modal sebesar Rp.9.485.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.426.780.000,00 atau 99,39%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.94.214.356.428,00 terealisasi sebesar Rp.87.447.727.435,00 atau 92,82%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.184.496.593.464,00 terealisasi sebesar Rp.159.133.484.114,94 atau 86,25%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.263.570.339.074,00 terealisasi sebesar Rp.226.986.232.364,00 atau 86,12%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.12.888.714.973,00 terealisasi sebesar Rp.12.855.065.077,00 atau 99,74%.

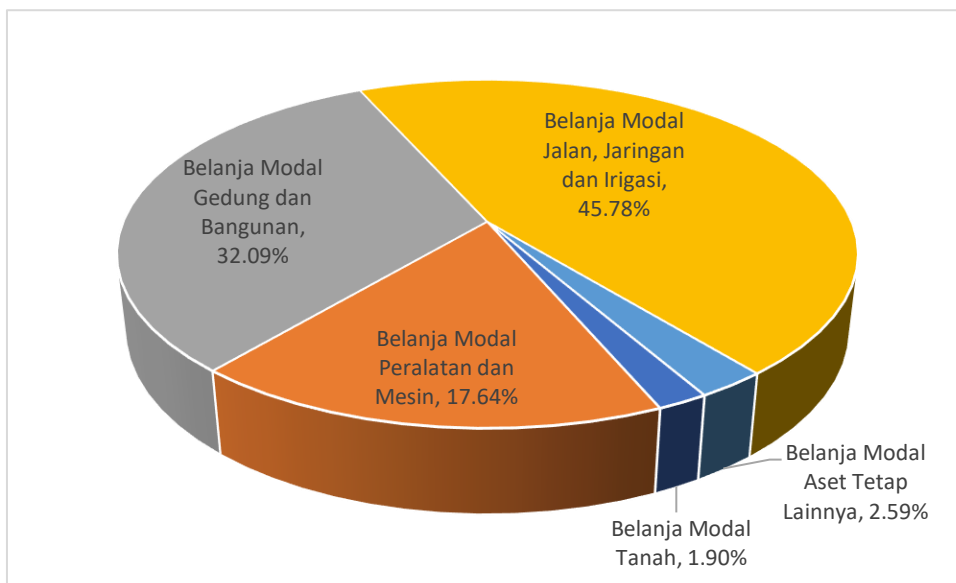
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021.





*Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021*

### **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.10.415.233.825,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.5.026.503.119,00 atau 48,61%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

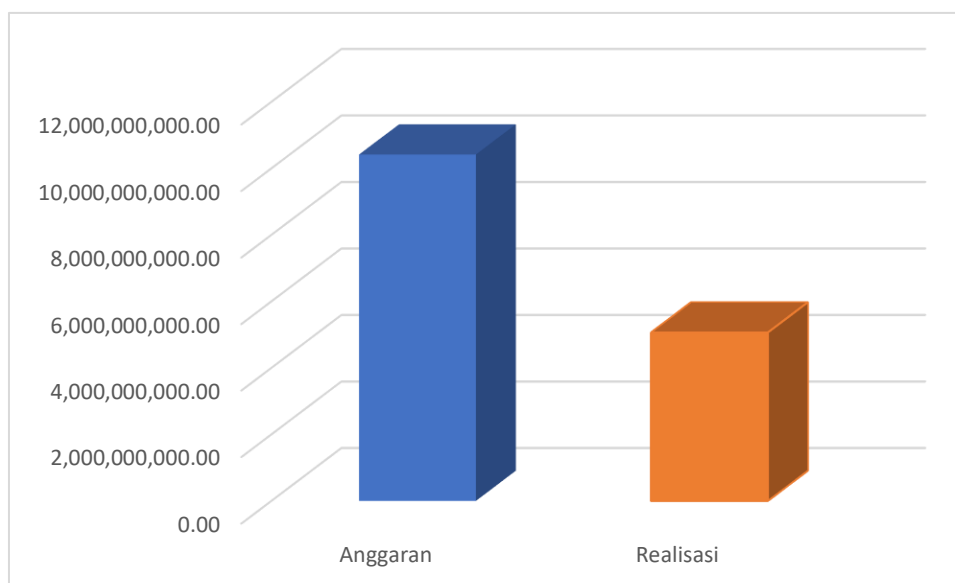
**Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2021 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	10.415.233.825,00	5.062.503.119,00	48,61
<b>Total Belanja Tidak Terduga</b>		10.415.233.825,00	5.062.503.119,00	48,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.415.233.825,00 terealisasi sebesar Rp.5.062.503.119,00 atau 48,61%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2021.



*Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021*

### Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2021, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp.165.288.991.024,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)**

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021
Penerimaan Pembiayaan	305.288.991.024,00	248.402.635.024,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	165.288.991.024,00	165.288.991.024,06
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	303.288.991.024,00	246.402.635.024,06
SURPLUS/(DEFISIT)	(303.288.991.024,00)	(89.223.102.207,15)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	157.179.532.816,91

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

## Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2021 masih terpengaruh oleh berlanjutnya pandemi Covid-19. Merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, stabilitas eksternal terjaga tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tercatat rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat. Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, dengan stabilitas eksternal yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik. (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021).

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial 10,46 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,55 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,39 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,84 persen dan 4,65 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. (*Berita Resmi Statistik, BPS Indonesia 2022*).

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Konstruksi sebesar 8,01 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,36 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,13 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 5 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,27 persen (*Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2022*)

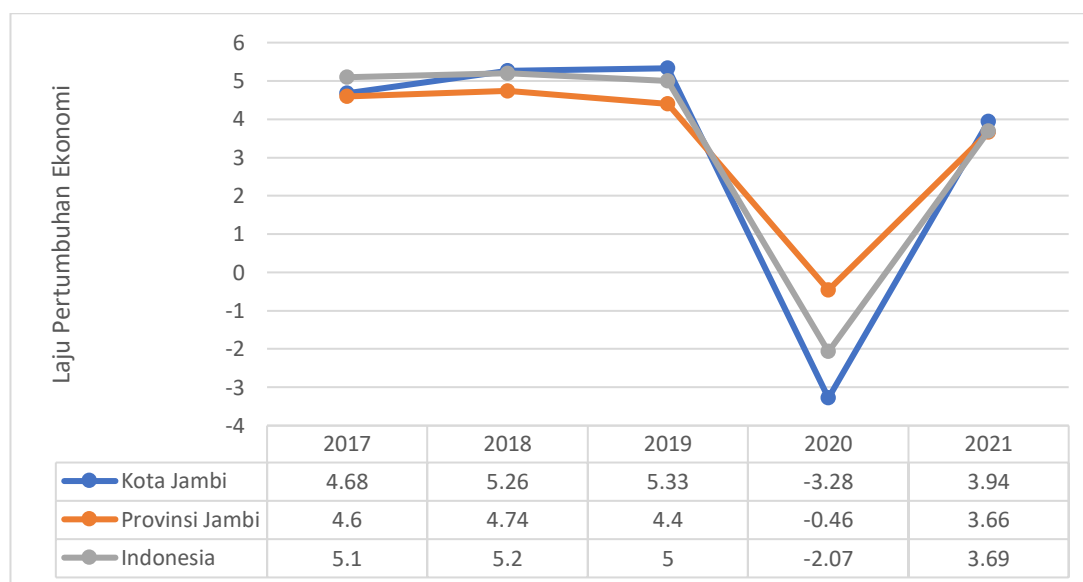
Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,94 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat diantaranya Industri Pengolahan sebesar 2,17 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,48 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,45 persen; Konstruksi sebesar 5,04 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 6,89 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,24 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,15 persen; Real Estate sebesar 3,19 persen; Jasa Perusahaan sebesar 4,35 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,26 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,95 persen dan Jasa Lainnya sebesar 0,85 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan negatif, di antaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -12,12 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,54 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 3,99 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,70 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 0,16 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2021 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah, bekerja serta mobilitas yang mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi di Kota

Jambi, seperti sektor transportasi terutama angkutan udara, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seperti perhotelan, restoran, pariwisata.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi pada Tahun 2021, juga berdampak pada sedikit pergeseran struktur ekonomi Kota Jambi. Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Adapun struktur ekonomi Kota Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2021 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (32,70%);
2. Industri Pengolahan (11,02%);
3. Konstruksi (9,49%);
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (8,41%);
5. Transportasi dan Pergudangan (7,98%).

Berikut disajikan gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi dan Kota Jambi selama lima tahun terakhir.



*Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021*

## Kondisi Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat,

maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Desember 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Kondisi inflasi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021, inflasi Kota Jambi sebesar 1,67% berada di bawah inflasi Tahun 2020 sebesar 3,09% serta berada di bawah inflasi Indonesia Tahun 2021 sebesar 1,87%. Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2021 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,22 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,38 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,54 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,03 persen. Tabel berikut menunjukkan kondisi inflasi Kota Jambi pada Tahun 2021.

Adapun nilai inflasi dan rata-rata nilai inflasi di Kota Jambi selama tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

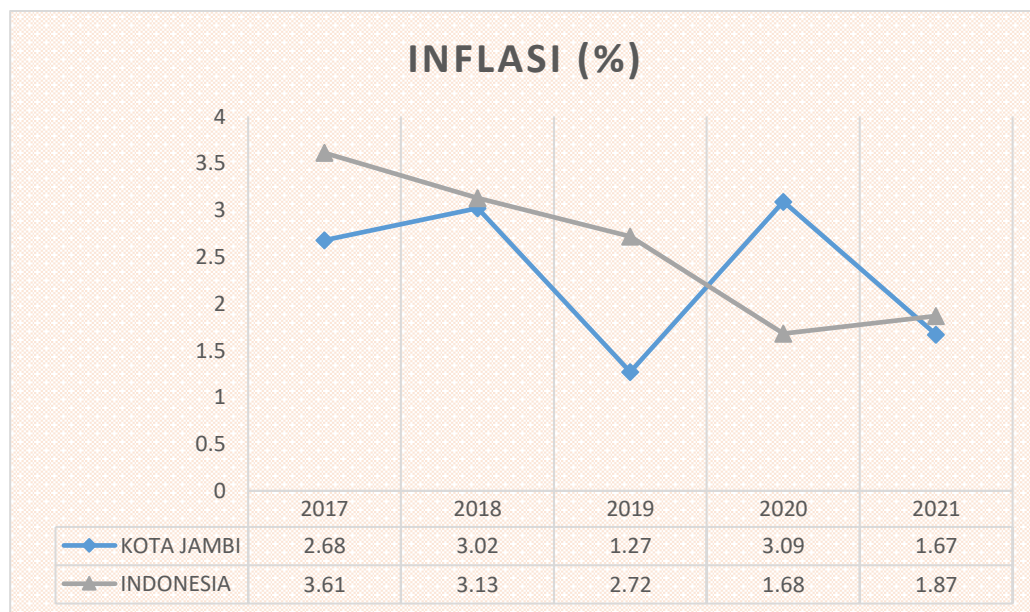
**Nilai Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2017 s.d 2021**

TAHUN	INFLASI (%)
-------	-------------

	KOTA JAMBI	INDONESIA
2017	2,68	3,61
2018	3,02	3,13
2019	1,27	2,72
2020	3,09	1,68
2021	1,67	1,87

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022

Secara umum dari Tahun 2017-2021 kondisi inflasi di Kota Jambi mengalami fluktuasi namun relatif terkendali. Untuk melihat trend inflasi Kota Jambi dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Trend Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, metodologi penghitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Sejak 2014 sampai dengan sekarang IPM menggunakan metode terbaru dalam pengukurannya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir

(UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi,  
Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2020-2021**

URAIAN	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020-2021
Kota Jambi	72,65	72,71	15,1	15,37	10,92	11,20	12.056	12.240	78,37	79,12	0,95
Provinsi Jambi	71,16	71,22	12,98	13,04	8,55	8,60	10.392	10.588	71,29	71,63	0,47
Indonesia	71,47	71,57	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	71,94	72,29	0,48

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022

Keterangan :

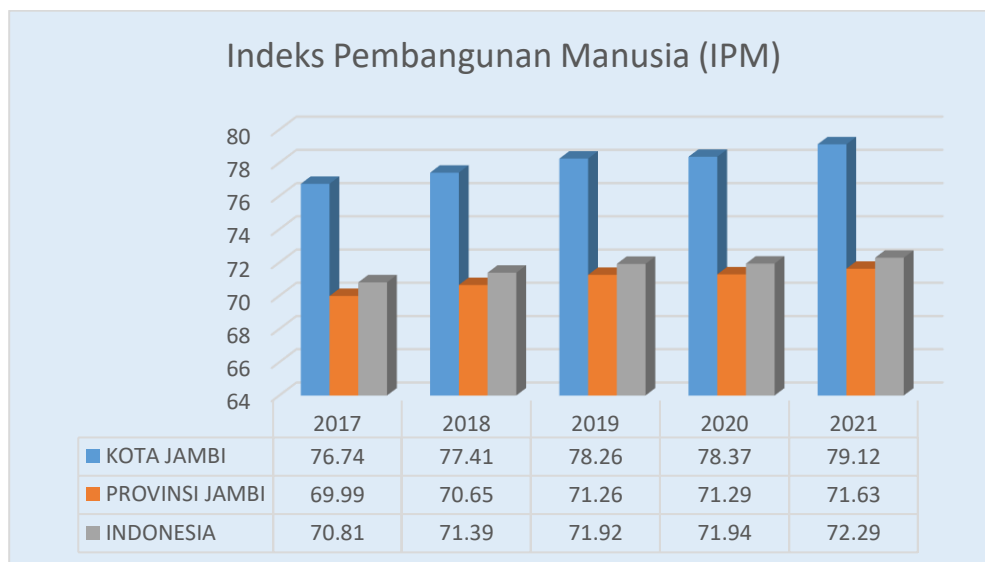
UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Adapun perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.





*Perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kota Jambi berada jauh di atas IPM Provinsi Jambi maupun IPM Indonesia.

### Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal (*basic needs approach*) untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

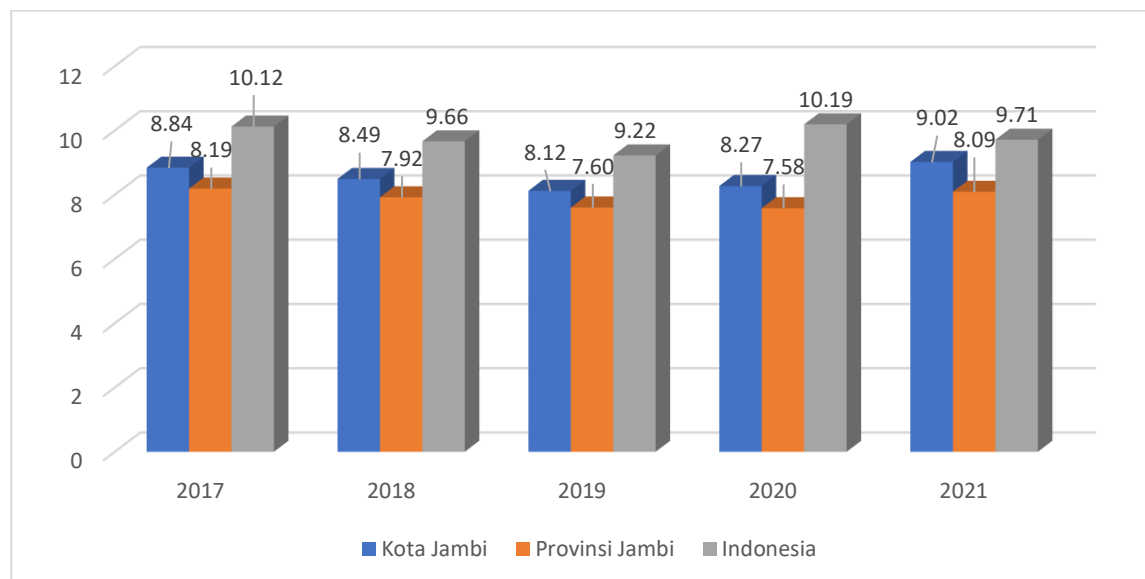
#### **Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019-2021**

URAIAN	Persentase Kemiskinan (%)			Garis Kemiskinan (Rupiah)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kota Jambi	8,12	8,27	9,02	488.034	529.090	563.403
Provinsi Jambi	7,60	7,58	8,09	488.509	483.542	506.355
Indonesia	9,22	10,19	9,71	458.380	475.477	502.730

*Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022*

Berdasarkan tabel di atas bahwa angka kemiskinan dan garis kemiskinan di Kota Jambi mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Peningkatan angka kemiskinan sejak tahun 2020

dikarenakan aktivitas ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19. Adapun perbandingan persentase kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



*Perbandingan Persentase Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase kemiskinan Kota Jambi berada di bawah persentase kemiskinan Indonesia, namun berada di atas persentase kemiskinan Provinsi Jambi.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

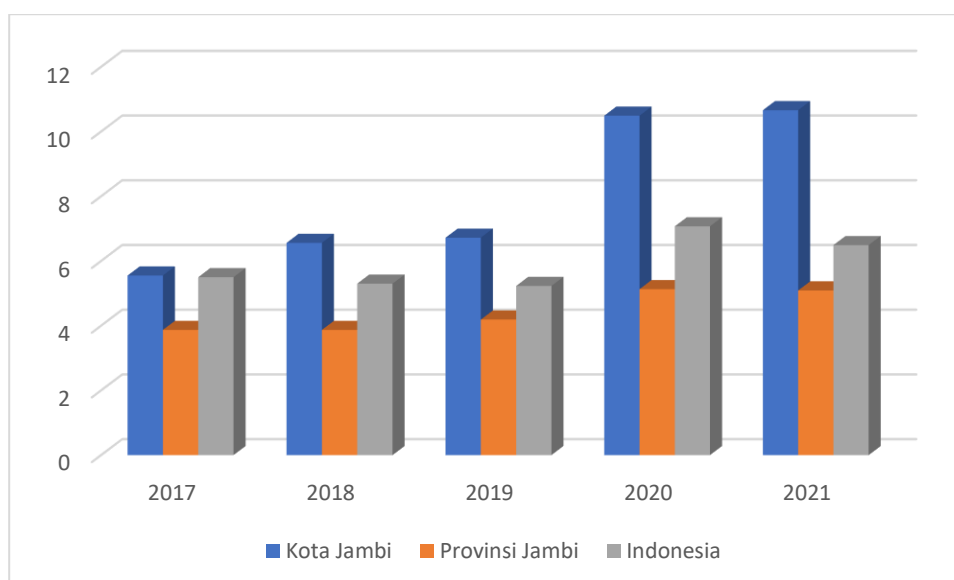
### **TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA TAHUN 2017-2021**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
-------	------------------------------

	Kota Jambi	Provinsi Jambi	Indonesia
2017	5,55	3,87	5,50
2018	6,56	3,87	5,30
2019	6,72	4,19	5,23
2020	10,49	5,13	7,07
2021	10,66	5,09	6,49

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi berada di atas tingkat pengangguran Provinsi Jambi dan Indonesia. Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



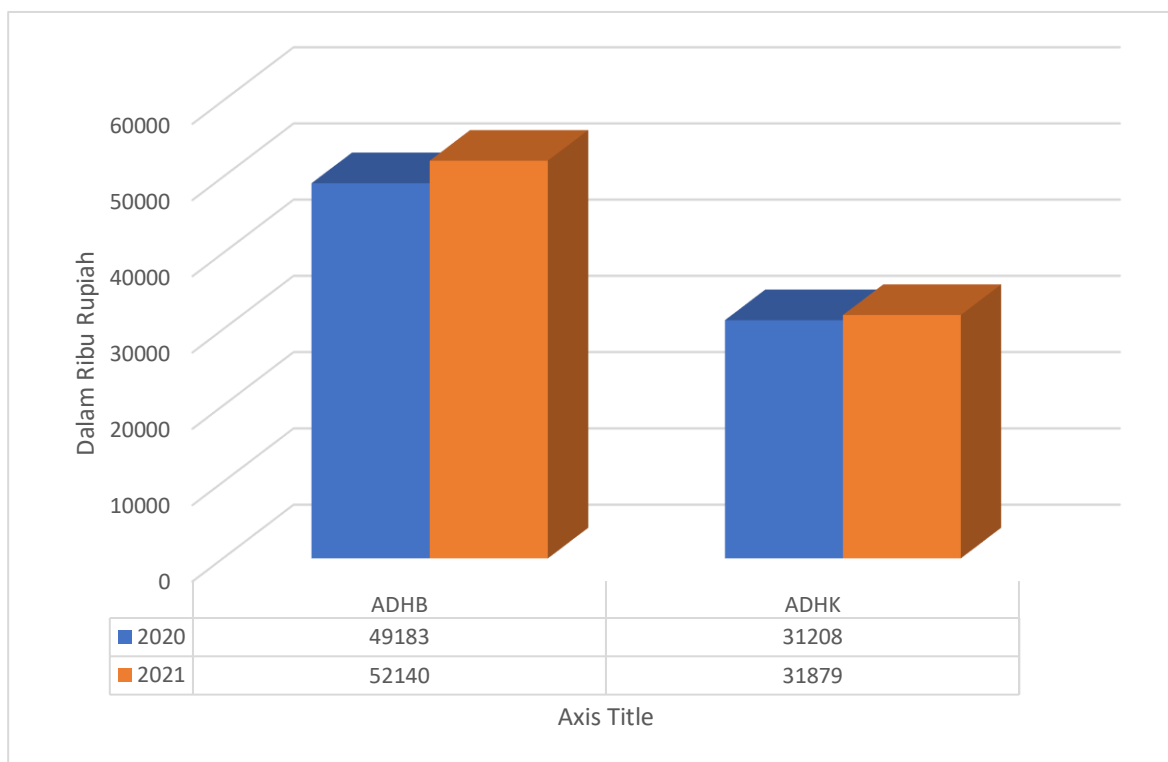
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021

Kota Jambi merupakan ibukota dari Provinsi Jambi. Pemusatan kegiatan ekonomi di kota menciptakan terjadinya migrasi penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Situasi ini dalam jangka panjang menyebabkan surplus tenaga kerja yang kronik di kota. Surplus tenaga kerja berarti tingkat pengangguran di kota cenderung tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak di bidang ekonomi. Terjadi perlambatan aktivitas ekonomi mengakibatkan banyak tenaga kerja yang di PHK.

## Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara, artinya

masyarakat tersebut semakin Makmur. Adapun perbandingan pendapatan perkapita Kota Jambi tahun 2020 - 2021 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



*Pendapatan Perkapita Tahun 2020 dan 2021*

Pada Tahun 2020 pendapatan perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.49.183.000 dan mengalami peningkatan menjadi Rp.52.140.005 pada tahun 2021. Sementara pendapatan perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 sebesar Rp.31.208.000 dan mengalami peningkatan menjadi Rp.31.879.616 pada tahun 2021 (BPS Kota Jambi, data diolah).

## Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Artinya, penduduk dengan *income* tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total *income* seluruh penduduk.

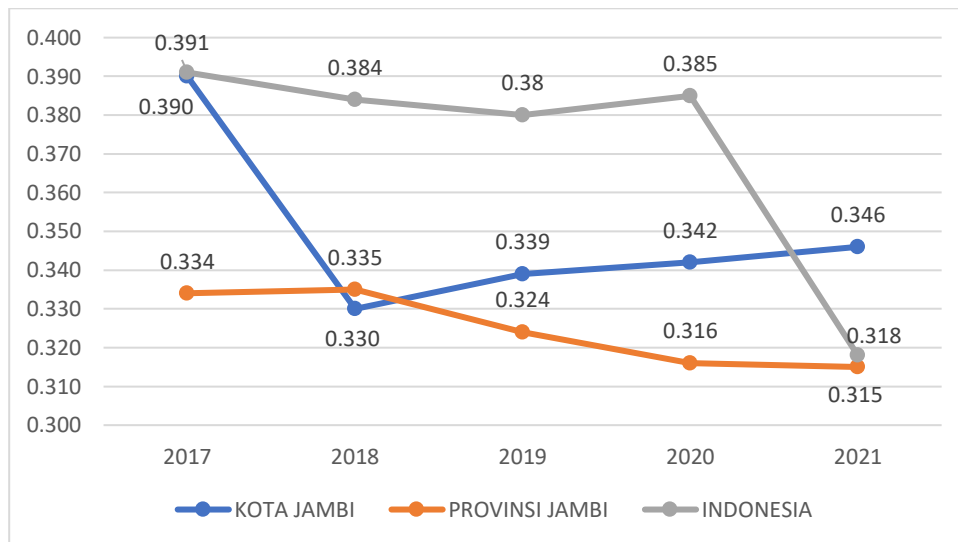
### Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Gini Ratio		
	Kota Jambi	Provinsi Jambi	Indonesia
2017	0,390	0,334	0,391

2018	0,330	0,335	0,384
2019	0,339	0,324	0,38
2020	0,342	0,316	0,385
2021	0,346	0,315	0,318

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022

Secara umum dari Tahun 2017-2021 kondisi *gini ratio* di Kota Jambi mengalami fluktuasi namun relatif terkendali. Untuk melihat trend *gini ratio* Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.27  
Trend Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir *gini ratio* mengalami fluktuasi. *Gini ratio* mengalami penurunan pada tahun 2018 dan tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2021.

## 1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

## **B. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi

juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2018-2023, telah ditetapkan Visi Kota Jambi, yaitu:

**“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA  
BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN  
MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Batasan konsep yang terdapat dalam visi di atas adalah sebagai berikut:

- ***Pusat Perdagangan dan Jasa***: berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- ***Berbasis Masyarakat***: berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- ***Berakhlak***: Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- ***Berbudaya***: Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- ***Pelayanan Prima***: upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan

- Lingkungan;
3. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
  4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

**Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi**

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

**Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat**

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

**Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan**

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.



#### **Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

#### **Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan**

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

### **C. Program Pembangunan Daerah, Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

## Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi

### VISI: MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi</b>		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
		Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
<b>Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat</b>		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
<b>Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan</b>		
T.4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	S.6. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana perhubungan yang handal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
	S.7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.8. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
		Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
		Peningkatan harmonisasi ruang kota
	S.9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
	S.10. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
<b>Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan</b>		
T.5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	S.16. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
		Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan</b>		
T.6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
	S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

## **D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut:

<b>TEMA PEMBANGUNAN</b>				
<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

<b>TEMA PEMBANGUNAN</b>				
<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik



TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Mendorong aktivitas MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Mendorong aktivitas MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

### 1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Jambimenerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro				
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,37	79.12	0.957
2	Angka Kemiskinan	8,27	9.02	9.069
3	Angka Pengangguran	10.49	10.66	1.621
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3.28	3.94	220.122
5	Pendapatan Per kapita	49183	52140	6.012
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.342	0.346	1.17

## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	246	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya	-	Dinas Pendidikan	

		pendidikan			
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1293	Dinas Pendidikan	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	940	Dinas Pendidikan	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	587	Dinas Pendidikan	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	209	Dinas Pendidikan	
8		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	234	Dinas Pendidikan	
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	491	Dinas Pendidikan	
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	552	Dinas Pendidikan	
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2378	Dinas Pendidikan	
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	492	Dinas Pendidikan	
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3116	Dinas Pendidikan	

16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1741	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2398	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	492	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	137	Dinas Pendidikan	
20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	64	Dinas Pendidikan	
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2871	Dinas Pendidikan	
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1605	Dinas Pendidikan	
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	109	Dinas Pendidikan	
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	50	Dinas Pendidikan	
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	454	Dinas Pendidikan	
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	234	Dinas Pendidikan	
27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	9	Dinas Pendidikan	
28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	



29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
30		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	104	Dinas Pendidikan	
31		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	93	Dinas Pendidikan	
32		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	73	Dinas Pendidikan	
33		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	109	Dinas Pendidikan	
34		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Dinas Pendidikan	
1	<b>Kesehatan</b>	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4	Dinas Kesehatan	
3		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
4		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3	-	
5		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	-	
6		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	3	-	
7		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	-	
8		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3	-	
9		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	-	
10		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3	-	
11		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	-	

12		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasarsesuai standar	3	-	
13		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
15		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	-	
16		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
17		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	-	
18		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
19		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
20		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
21		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas PUPR	
2		Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (m)	32.07	Dinas PUPR	
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
4		Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PUPR	
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangankabupaten/kota	1	Dinas PUPR	

6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	4	Dinas PUPR	
8	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	70.99	Dinas PUPR	
9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	
10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	
11	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas PUPR	
13	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPR	
15	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	-	Dinas PUPR	
16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	Dinas PUPR	
17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.824	Dinas PUPR	
18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	-	Dinas PUPR	
19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1216	Dinas PUPR	

20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1412	Dinas PUPR	
21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1216	Dinas PUPR	
22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	-	Dinas PUPR	
23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1.66	Dinas PUPR	
24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1.49	Dinas PUPR	
25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1.66	Dinas PUPR	
26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	9.09	Dinas PUPR	
27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0.03	Dinas PUPR	
28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	Dinas PUPR	
29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.64	Dinas PUPR	
30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	Dinas PUPR	
31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	Dinas PUPR	
32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas PUPR	
34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	Dinas PUPR	
35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	Dinas PUPR	
36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	383	Dinas PUPR	
37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang	273	Dinas PUPR	

		dipelihara/dirawat			
38		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	510.452	Dinas PUPR	
39		Panjang jalan yang dibangun	-	Dinas PUPR	
40		Panjang jembatan yang dibangun	-	Dinas PUPR	
41		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	14.981	Dinas PUPR	
42		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	16	Dinas PUPR	
43		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	13.321	Dinas PUPR	
44		Panjang jalan yang dipelihara	9400	Dinas PUPR	
45		Panjang jembatan yang dipelihara	5	Dinas PUPR	
46		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	5	Dinas PUPR	
47		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	45.9	Dinas PUPR	
48		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	459	Dinas PUPR	
49		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	9	Dinas PUPR	
50		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	Dinas PUPR	
51		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Dinas PUPR	
52		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas PUPR	

53	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Dinas PUPR	
54	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
55	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	10	Dinas PUPR	
56	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	10	Dinas PUPR	
57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	10	Dinas PUPR	
58	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
59	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	153	Dinas PUPR	
60	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
61	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas PUPR	
62	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	-	Dinas PUPR	

		menjadi kewenangan pengawasannya			
63		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	119	Dinas PUPR	
64		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	34	Dinas PUPR	
65		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	119	Dinas PUPR	
66		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	130	Dinas PUPR	
67		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	153	Dinas PUPR	
68		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
69		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
70		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>					
1	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	57837	Dinas PRKP	
2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	35	Dinas PRKP	
3		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban yang rumahnya terkena bencana alam	75	Dinas PRKP	
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	
5		Jumlah unitrumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	
6		Jumlah unit rumah korbanbencana yang dibangun baru/relokasisesuaidean rencana aksi	-	Dinas PRKP	
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban	-	Dinas PRKP	

		bencana			
8		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban bencana yang terfasilitasi	-	Dinas PRKP	
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Dinas PRKP	
10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
12		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
15		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PRKP	
16		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	67.12	Dinas PRKP	
17		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	475	Dinas PRKP	
18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	24.85	Dinas PRKP	
19		Jumlah rumah di kab/kota	156.799	Dinas PRKP	
20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	475	Dinas PRKP	
21		Jumlah rumah tidak layak	6605	Dinas PRKP	



		huni			
22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	Dinas PRKP	
23		Rasio rumah dan KK	-	Dinas PRKP	
24		Jumlah rumah pembangunan baru	2.108	Dinas PRKP	
25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	-	Dinas PRKP	
26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	89.066	Dinas PRKP	
27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	Dinas PRKP	
28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	136.83	Dinas PRKP	
29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	23	Dinas PRKP	
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	Dinas PRKP	
31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	145	Dinas PRKP	
32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	145	Dinas PRKP	
33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Dinas PRKP	
1	<b>Trantimbumlinmas (POLPP)</b>	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	64	Satpol PP	
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	224	Satpol PP	
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	29	Satpol PP	
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11	Satpol PP	
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	3	Satpol PP	

6		Tersedianyasarana prasarana minimal	408	Satpol PP	
1	Trantibumlinmas (DAMKAR)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0.73	Disdamkar	
3		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
4		Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
5		Persentase jumlah aparaturnegara dan warga negara yang ikut pelatihan	0.22	Disdamkar	
6		Presentase warga negara yang ikut pelatihan	0.22	Disdamkar	
6		presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	-	Disdamkar	
7		Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	-	Disdamkar	
8		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap staus KLB	-	Disdamkar	
9		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamb untuk setiap status darurat bencana	-	Disdamkar	
10		presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Disdamkar	
11		presentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	2	Disdamkar	
12		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	161	Disdamkar	
13		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	5	Disdamkar	
14		Tersedianya aparaturnegara selama24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	85	Disdamkar	
15	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar,	Tidak ada	Disdamkar		

		sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			
16		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah 339 terdiri dari 19 jenis	Disdamkar	
17		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	48	Disdamkar	
18		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	235 orang	Disdamkar	
19		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	30 orang	Disdamkar	
1	<b>trantibumlinmas (SOSIAL)</b>	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	69	Dinas Sosial	
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	-	Dinas Sosial	
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	Dinas Sosial	
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang dijangkau	1098	Dinas Sosial	
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	652	Dinas Sosial	
7		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8	Dinas Sosial	
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	25	Dinas Sosial	

		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2	Dinas Sosial	
11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial	
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiatelantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	69	Dinas Sosial	
13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	Dinas Sosial	
14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2	Dinas Sosial	
15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	2193	Dinas Sosial	
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	Dinas Sosial	
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	Dinas Sosial	
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1	Dinas Sosial	
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	11	Dinas Sosial	
20		Jumlah penyandangdisabilitas terlan tar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	11	Dinas Sosial	

21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang Dirujuk	5	Dinas Sosial	
22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1196	Dinas Sosial	
23		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1196	Dinas Sosial	
24		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Dinas Sosial	
25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Dinas Sosial	
26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanandukungan psikososial	-	Dinas Sosial	
27		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	2 Jiwa	Dinas Sosial	
1	<b>Ketenagakerjaan</b>	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	-	Dinas TKK dan UKM	
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-	Dinas TKK dan UKM	
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-	Dinas TKK dan UKM	
4		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	33.33	Dinas TKK dan UKM	
5		presentase instruktur bersertifikat kompetensi	38.39	Dinas TKK dan UKM	
6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	140	Dinas TKK dan UKM	
7		Persentase LPK yang memiliki perizinan	9.52	Dinas TKK dan UKM	
8		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas TKK dan UKM	
9		Jumlah penggaur yang dilatih	80	Dinas TKK dan UKM	
10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas TKK dan UKM	
11		Persentase penyerapan lulusan	52.25	Dinas TKK dan UKM	
12		Lulusan bersertifikat kompetensi	20	Dinas TKK dan UKM	
13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100	Dinas TKK dan UKM	

		yang diberikan Pelatihan			
13		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	20	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1.14	Dinas TKK dan UKM	
15		Data tingkat produktivitas total	-	Dinas TKK dan UKM	
16		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	22.68	Dinas TKK dan UKM	
17		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	22.68	Dinas TKK dan UKM	
18		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	160	Dinas TKK dan UKM	
19		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	15.03	Dinas TKK dan UKM	
20		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	281.27	Dinas TKK dan UKM	
21		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.31	Dinas TKK dan UKM	
22		Jumlah mogok kerja	1	Dinas TKK dan UKM	
23		Jumlah penutupan perusahaan	1	Dinas TKK dan UKM	
24		Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas TKK dan UKM	
25		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	Dinas TKK dan UKM	
26		Jumlah perselisihan PHK	52	Dinas TKK dan UKM	
27		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	101	Dinas TKK dan UKM	
28		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	-	Dinas TKK dan UKM	
29		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang Diberdayakan	42	Dinas TKK dan UKM	
30		Persentase perselisihan hubungan industrial yang	72.22	Dinas TKK dan UKM	

		diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
31		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1072	Dinas TTK dan UKM	
32		Jumlah pencari kerjayang terdaftar di kab/kota	2470	Dinas TTK dan UKM	
33		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	29	Dinas TTK dan UKM	
34		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10	Dinas TTK dan UKM	
36		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	-	Dinas TTK dan UKM	
37		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas TTK dan UKM	
38		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	11	Dinas TTK dan UKM	
39		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1005	Dinas TTK dan UKM	
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	-	Dinas TTK dan UKM	
41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	20	Dinas TTK dan UKM	
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan	-	Dinas TTK dan UKM	
43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100.00 %	Dinas TTK dan UKM	
44		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	Dinas TTK dan UKM	
45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	Dinas TTK dan UKM	
1	<b>Koperasi, usaha kecil dan menengah</b>	presentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk keoperasi dengan wilayah	-	Dinas TTK dan UKM	

		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas TKK dan UKM	
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.73	Dinas TKK dan UKM	
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24.09	Dinas TKK dan UKM	
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	54.55	Dinas TKK dan UKM	
6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.48	Dinas TKK dan UKM	
7		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	Dinas TKK dan UKM	
8		presentasi fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35	Dinas TKK dan UKM	
9		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31.82	Dinas TKK dan UKM	
10		presentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15.91	Dinas TKK dan UKM	
11		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10.91	Dinas TKK dan UKM	
12		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	0.91	Dinas TKK dan UKM	



		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
13		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	27.51	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	29.66	Dinas TKK dan UKM	
15		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	100	Dinas TKK dan UKM	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.14	Dinas TKK dan UKM	
17		presentae jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4.39	Dinas TKK dan UKM	
18		rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4.21	Dinas TKK dan UKM	
19		persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	2.58	Dinas TKK dan UKM	
1	<b>DPMPA</b>	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	39	Dinas PMPPA	
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	25	Dinas PMPPA	
3		jumlah medai massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas ppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Dinas PMPPA	
4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	Dinas PMPPA	
5		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	20.47	Dinas PMPPA	
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	5	Dinas PMPPA	
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	Dinas PMPPA	
8		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan pelatihan	37	Dinas PMPPA	
9		Jumlah kader perempuan tingkat	73	Dinas PMPPA	

		kabupaten/kota yang sudah dilatih			
10		Jumlah lembagayanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	9	Dinas PMPPA	
11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas PMPPA	
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas PMPPA	
13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3	Dinas PMPPA	
14		Persentase korbankekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas PMPPA	
1	<b>Pertanian</b>	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1849	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Prasarana pertanian yang digunakan	122	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	40	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		presentse fasilitas penanggulangan bencana	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Pangan</b>	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	14110	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	Dinas Pertanian dan Pangan	

4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergiziseimbang	15	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Tersedianya petaketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		Tertanganinya kerawananpangan	4	Dinas Pertanian dan Pangan	
7		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	14.583	Dinas Pertanian dan Pangan	
8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	84	Dinas Pertanian dan Pangan	
<b>Perikanan</b>					
1		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	48	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Persentase TempatPelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupater/ kota yang diterbitkan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	28	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	82897500	Dinas Pertanian dan Pangan	
<b>Pertanahan</b>					
1		SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	-	Data Nihil	
2		SK walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	-	Data Nihil	
3		SK Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	-	Data Nihil	
4		Dokumen izin membuka tanah	-	Data Nihil	

5		Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	-	Data Nihil	
1	<b>Lingkungan hidup</b>	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH)	44	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	85	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	49	Dinas Lingkungan Hidup	
4		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	11900294	Dinas Lingkungan Hidup	
5		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	14	Dinas Lingkungan Hidup	
6		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan Hidup	
7		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	-	Dinas Lingkungan Hidup	
8		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas Lingkungan Hidup	
9		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	41	Dinas Lingkungan Hidup	
1	<b>Disdukcapil</b>	Penerbitan akta perkawinan	139731	Disdukcapil	
2		Penerbitan akta perceraian	9.38	Disdukcapil	
3		Penerbitan akta kematian	12363	Disdukcapil	
4		penyajian data kependudukan	2	Disdukcapil	

1	<b>Keluarga Bencana</b>	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	Dinas PPKB	
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22	Dinas PPKB	
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	7.91	Dinas PPKB	
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	745	Dinas PPKB	
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5	Dinas PPKB	
6		presentasi fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	39.09	Dinas PPKB	
7		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18.9	Dinas PPKB	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	264	Dinas PPKB	
9		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	49.96	Dinas PPKB	
10		persentase kesertaan KB kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	50.61	Dinas PPKB	
11		Persentase kesertaan KB Penerima Bantuan Iuran (PBI)	61.1	Dinas PPKB	
1	<b>Perhubungan</b>	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100	Dinas Perhubungan	
2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	147.85	Dinas Perhubungan	
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Dinas Perhubungan	
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	34.24	Dinas Perhubungan	
1	<b>Penanaman Modal</b>	Perda mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang	-	DPMPTSP	

		menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	
4		Kegiatan semunar bisnis, forum, one on one meeting	15	DPMPTSP	
5		Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	DPMPTSP	
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	15	DPMPTSP	
8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	9802	DPMPTSP	
9		Laporan realisasi penanaman modal	653.18	DPMPTSP	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	200	DPMPTSP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	411	DPMPTSP	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	39	DPMPTSP	
1	<b>Pemuda dan olahraga</b>	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100	DISPORA	
2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	DISPORA	
3		Jumlah pemuda mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	420	DISPORA	
4		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	DISPORA	
5		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	14	DISPORA	
6		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	DISPORA	
1	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah	49.51	DISKOMINFO	

		atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan yang disediakan oleh dinas kominfo			
2		presentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang di sediakan dinas kominfo	47.57	DISKOMINFO	
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	iya	DISKOMINFO	
4		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	98.28	DISKOMINFO	
5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DISKOMINFO	
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DISKOMINFO	
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	DISKOMINFO	
8		presentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	18.75	DISKOMINFO	
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan undang-undang	100	DISKOMINFO	
10		presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	10.53	DISKOMINFO	
11		presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DISKOMINFO	

12		Persentase perangkat daerah yang menyimpandata di pusat data pemerintah	100	DISKOMINFO	
13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	DISKOMINFO	
14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	DISKOMINFO	
15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	DISKOMINFO	
16		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	37.84	DISKOMINFO	
17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	DISKOMINFO	
18		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	DISKOMINFO	
19		presentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	166.67	DISKOMINFO	
20		Presentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanaka sesuai dengan strtegi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah di tetapkan	100	DISKOMINFO	
<b>Persandian</b>					
1		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	DISKOMINFO	
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	91.43	DISKOMINFO	
3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0.00	DISKOMINFO	
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik	100	DISKOMINFO	



		pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan			
1	<b>Statistik</b>	Tersedianya buku profil daerah	5	DISKOMINFO	
2		Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	2	DISKOMINFO	
3		Jumlah kompilasi statistiksektoral yang dilakukan	114	DISKOMINFO	
4		Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	DISKOMINFO	
5		Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	DISKOMINFO	
6		presentase kelengkapn meta data kegiatan statistik sektoral	-	DISKOMINFO	
7		presentase kelengkapan metadata variable sektoral	-	DISKOMINFO	
1	<b>Pariwisata</b>	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	26	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	26	Dinas Pariwisata	
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	50	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3136	Dinas Pariwisata	
5		Jumlah promosievent daerah yang terlaksanadi dalam negeri	2	Dinas Pariwisata	
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata	
7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	51	Dinas Pariwisata	
8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	30	Dinas Pariwisata	
9		presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Pariwisata	
10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha	9	Dinas Pariwisata	

		masyarakat			
1	<b>Kebudayaan</b>	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (investasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (enyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	Dinas Pariwisata	
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	246	Dinas Pariwisata	
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1	Dinas Pariwisata	
6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	Dinas Pariwisata	
7		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Dinas Pariwisata	
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Pariwisata	
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	Dinas Pariwisata	
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pariwisata	
11		peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan -sarana dan -praasarana -museum	-	Dinas Pariwisata	
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan	-	Dinas Pariwisata	

		pemanfaatan koleksi museum			
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Dinas Pariwisata	
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	Dinas Pariwisata	
1	<b>Kearsipan</b>	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2.69	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	2.85	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1139	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
7		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	1157	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
9		Pencarian arsipstatis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	

		NSPK			
10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
1	<b>Perpustakaan</b>	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9.56	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.31	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.65	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	33	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
1	<b>Perindustrian</b>	Presentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		presentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5		presentase data perusahaan industri di Kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	0.18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

1	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		presentasi penerbitan TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		presentase penerbitan STPW yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0.98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
10		presentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	96.61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
11		presentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	43,57%	Dinas Pendidikan	
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93.57%	Dinas Pendidikan	
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	71.37%	Dinas Pendidikan	
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.82%	Dinas Pendidikan	

1	<b>Kesehatan</b>	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,26%	Dinas Kesehatan	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	58.82%	Dinas Kesehatan	
3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	
4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	
5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.10%	Dinas Kesehatan	
8		persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92.02%	Dinas Kesehatan	
10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84.09%	Dinas Kesehatan	
11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	125%	Dinas Kesehatan	
12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
13		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
14		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1	<b>Pekerjaan Umum</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	14.34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	54.94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94.69%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16.22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91.62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	45.9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	72.22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	<b>Perumahan Rakyat</b>	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	37.02%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	4.21%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1.39%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1	<b>Trantibumlinmas (POL PP)</b>	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
2		persentase perda dan perkara yang ditegakan	100%	Satpol PP	
1	<b>Trantibumlinmas (DAMKAR)</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2125	Damkar	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	625	Damkar	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Damkar	
4		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Damkar	
5		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14.4	Damkar	
1	<b>Trantibumlinmas (SOSIAL)</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	80%	Dinas Sosial	

		terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
1	<b>Ketenagakerjaan</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.03%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7421072045145.1	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	26.68%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
5		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	40.68%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	26.36 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	92.77%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	<b>Perlindungan perempuan dan perlindungan anak</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	27.50%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17.14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	<b>Pertanian</b>	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	480.15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-99.50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	



1	<b>Pangan</b>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	68.33%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	<b>Perikanan</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	2.78%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	<b>Pertanahan</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	18.42%	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	
3		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	50	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	<b>Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	58	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	75.26	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	83	Dinas Lingkungan Hidup	
1	<b>Disdukcapil</b>	Perekaman KTP Elektronik	99,43 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45,43 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

				Sipil	
3		Kepemilikan akta kelahiran	99,72 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	53,65 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	<b>Keluarga Bencana</b>	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	55.20 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16.86 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
1	<b>Perhubungan</b>	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.73	Dinas Perhubungan	
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.35	Dinas Perhubungan	
1	<b>Penanaman Modal</b>	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	- 1.219%	Dinas Penanamam Modal	
1	<b>Pemuda dan Olahraga</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.80 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.14 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3		Peningkatan Prestasi Olahraga	13	Dinas Pemuda dan Olahraga	
1	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	49.51 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80.48%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
3		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74,173 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Persandian</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75.86 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	

1	<b>Statistik</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Pariwisata</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10.15 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-- 72.49%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3		Tingkat Hunian Akomodasi	5.57%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Di lampirkan surat keterangan
5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2614	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	<b>Kebudayaan</b>	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	<b>Kearsipan</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban pasal 40 dan pasal 29 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	18%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1,33%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	<b>Perpustakaan</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60.38	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	<b>Perindustrian</b>	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4.42%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	116.66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	<b>Perdagangan</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96.90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

## 2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Perencanaan keuangan</b>	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	31.61 %	Badan Pengeloaah Keuangan Daerah	
2		Rasio PAD	2013.34 %	Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah	
3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality	Inspektorat Kota Jambi	

			Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:		
4		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:	Inspektorat Kota Jambi	
5		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	68.20 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
7		Opini Laporan Keuangan	Ada 10	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
1	<b>Keuangan</b>	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	11.30 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	15.75%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
3		Assets Management	Iya	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
4		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9.42%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
1	<b>Pengadaan</b>	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0.59%	Unit Pelayanan Pengadaan	
2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2.44 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	99.16 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
1	<b>Kepegawaian</b>	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	322.22 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,35%	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75.92 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolak ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan

diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	$\geq 91$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	

4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

#### b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2021.

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	-	2,9	1,69	58,27%	2,44
2.	Indeks profesionalitas ASN	55	116%	63,08	64,24	101,84%	88,00
3.	Nilai SAKIP	B	94,3%	B	-	-	A
4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	94,85%	3,73	-	-	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	99,43%	87,00%	86,05%	99,43%	88,5%
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82,00%	93,75%	75%	79%	105,33%	60,00%
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	93,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	243,00%	20,00%	21,74%	108,7%	20,00%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	107,88%	70,61%	74,76%	105,88%	85,79%
11.	Indeks kualitas air	32,11	103,40	39,75	43,99	110,6%	43,38
12.	Indeks kualitas udara	80,68	104,70	80,74	85,02	105,3%	91,45
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	107,48	42	49,91	118,8%	61,37
14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	223,52%	68%	37,92%	55,76%	100,00%
15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	100,55%	91,6%	86,7%	94,65%	92,5%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	96,21%	2,29%	3,15%	137,55%	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	-107,11%	9,00%	7,97	88,55%	9,00%
18.	Realisasi investasi	410 M	68,39%	474,62 M	653,17 M	137,62%	523,37 M
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	98,27%	65,50%	63,12%	96,36%	66,00%
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	100,00%	9,02%	9,02%	100,00%	10,00%
21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	52,34%	6,5%	1,64%	25,23%	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	101,46%	23,85%	26,36%	110,52%	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	100,41%	72,36	72,71	100,48	72,37%
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	103,35%	15,11	15,37	101,72	14,64%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	100,00%	12,32	12,32	100,00%	4,32%
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	102,15%	10,93	11,20	102,15%	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	1,05	104,76%	1,03	0,74	128,16%	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	96,46	99,52%	96,69%	96,83%	100,14%	97,15%



NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,73%	94,93	94,42	99,46%	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,39%	68,30	-	-	68,50
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	90%	80%	88,88%	100,00%
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	96,29%	63%	87%	138,09%	66%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	100,00%	57,9	57,91	100,00%	52,00
34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	96,09%	70%	80%	114,28%	85,00%

Sumber: LKJ Perangkat Daerah Diolah Bagian Organisasi (2021)

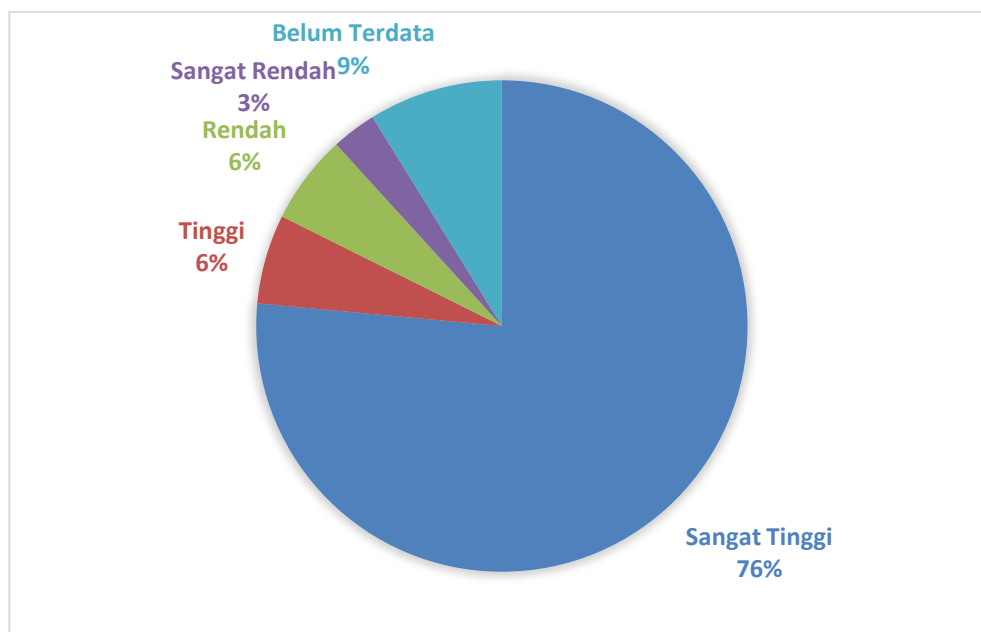
Catatan :

- IKU Nomor 3 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari KemenPAN RB, pada saat penyusunan LKJ nilai belum dirilis
- IKU Nomor 4 tidak dapat diisi karena KemenPAN RB pertahun 2021 tidak lagi mengeluarkan nilai Indeks Survey Persepsi Korupsi yang dialihkan menjadi angka/indeks dari Survey penilaian integritas (SPI) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh KPK.
- IKU Nomor 30 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari BPS Kota Jambi, pada saat penyusunan LKJ nilai belum dirilis

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2021, **26 indikator menunjukkan capaian  $\geq 91\%$  atau lebih** masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2021, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat **26 indikator menunjukkan capaian SANGAT TINGGI**, **2 indikator menunjukkan capaian Tinggi**, **0 indikator capaian Sedang**, **2 indikator capaian Rendah**, **1 indikator capaian Sangat Rendah** dan **3 Indikator BELUM TERDATA**.

Persentase Pencapaian IKU Tahun 2021



**c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan pada Tabel diatas di poin b dapat di sampaikan bahwa semua indikator yang telah di capai dari Tahun 2020-2021 dengan realisasinya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

**d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Berdasarkan pada Tabel diatas di poin b dapat di sampaikan bahwa semua indikator yang telah di capai dari Tahun 202 – 2021 dengan realisasinya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang disajikan dalam

tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai 19,91%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara yang hanya memiliki tingkat efisiensi 15,40%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

#### **f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya analisis atas efisiensi penggunaan daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Adanya sumber dana baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR dunia usaha
- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota layak anak
- Tanggung jawab dari gugus tugas kota layak anak dalam pemenuhan hak anak
- Dukungan dari dunia usaha dalam bentuk dana dan program kegiatan
- Dukungan dari media dalam pengembangan kota layak anak
- Dukungan dari masyarakat dalam perwujudan kota layak anak
- Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perwujudan KLA
- Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat
- Program inovasi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian kota layak anak.

## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro				
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,37	79.12	0.957
2	Angka Kemiskinan	8,27	9.02	9.069
3	Angka Pengangguran	10.49	10.66	1.621
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3.28	3.94	220.122
5	Pendapatan Per kapita	49183	52140	6.012
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.342	0.346	1.17

## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	246	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya	-	Dinas Pendidikan	

		pendidikan			
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1293	Dinas Pendidikan	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	940	Dinas Pendidikan	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	587	Dinas Pendidikan	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	209	Dinas Pendidikan	
8		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	234	Dinas Pendidikan	
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	491	Dinas Pendidikan	
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	552	Dinas Pendidikan	
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2378	Dinas Pendidikan	
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	492	Dinas Pendidikan	
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3116	Dinas Pendidikan	

16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1741	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2398	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	492	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	137	Dinas Pendidikan	
20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	64	Dinas Pendidikan	
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2871	Dinas Pendidikan	
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1605	Dinas Pendidikan	
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	109	Dinas Pendidikan	
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	50	Dinas Pendidikan	
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	454	Dinas Pendidikan	
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	234	Dinas Pendidikan	
27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	9	Dinas Pendidikan	
28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	

29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
30		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	104	Dinas Pendidikan	
31		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	93	Dinas Pendidikan	
32		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	73	Dinas Pendidikan	
33		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	109	Dinas Pendidikan	
34		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Dinas Pendidikan	
1	<b>Kesehatan</b>	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4	Dinas Kesehatan	
3		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
4		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3	-	
5		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	-	
6		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	3	-	
7		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	-	
8		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3	-	
9		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	-	
10		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3	-	
11		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	-	

12		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3	-	
13		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
15		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	-	
16		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
17		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	-	
18		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
19		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
20		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	-	
21		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	-	
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas PUPR	
2		Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	32.07	Dinas PUPR	
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
4		Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PUPR	
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	



6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	4	Dinas PUPR	
8	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	70.99	Dinas PUPR	
9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	
10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	
11	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas PUPR	
13	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPR	
15	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	-	Dinas PUPR	
16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	Dinas PUPR	
17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.824	Dinas PUPR	
18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	-	Dinas PUPR	
19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1216	Dinas PUPR	

20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1412	Dinas PUPR	
21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1216	Dinas PUPR	
22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	-	Dinas PUPR	
23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1.66	Dinas PUPR	
24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1.49	Dinas PUPR	
25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1.66	Dinas PUPR	
26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	9.09	Dinas PUPR	
27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0.03	Dinas PUPR	
28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	Dinas PUPR	
29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.64	Dinas PUPR	
30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	Dinas PUPR	
31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	Dinas PUPR	
32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas PUPR	
34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	Dinas PUPR	
35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	Dinas PUPR	
36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	383	Dinas PUPR	
37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang	273	Dinas PUPR	

		dipelihara/dirawat			
38		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	510.452	Dinas PUPR	
39		Panjang jalan yang dibangun	-	Dinas PUPR	
40		Panjang jembatan yang dibangun	-	Dinas PUPR	
41		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	14.981	Dinas PUPR	
42		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	16	Dinas PUPR	
43		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	13.321	Dinas PUPR	
44		Panjang jalan yang dipelihara	9400	Dinas PUPR	
45		Panjang jembatan yang dipelihara	5	Dinas PUPR	
46		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	5	Dinas PUPR	
47		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	45.9	Dinas PUPR	
48		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	459	Dinas PUPR	
49		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	9	Dinas PUPR	
50		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	Dinas PUPR	
51		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Dinas PUPR	
52		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas PUPR	

53	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Dinas PUPR	
54	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
55	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	10	Dinas PUPR	
56	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	10	Dinas PUPR	
57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	10	Dinas PUPR	
58	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
59	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	153	Dinas PUPR	
60	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
61	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas PUPR	
62	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	-	Dinas PUPR	

		menjadi kewenangan pengawasannya			
63		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	119	Dinas PUPR	
64		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	34	Dinas PUPR	
65		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	119	Dinas PUPR	
66		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	130	Dinas PUPR	
67		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	153	Dinas PUPR	
68		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
69		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
70		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>					
1	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	57837	Dinas PRKP	
2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	35	Dinas PRKP	
3		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban yang rumahnya terkena bencana alam	75	Dinas PRKP	
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	
5		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	
6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban	-	Dinas PRKP	

		bencana			
8		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban bencana yang terfasilitasi	-	Dinas PRKP	
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Dinas PRKP	
10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
12		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
15		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PRKP	
16		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	67.12	Dinas PRKP	
17		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	475	Dinas PRKP	
18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	24.85	Dinas PRKP	
19		Jumlah rumah di kab/kota	156.799	Dinas PRKP	
20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	475	Dinas PRKP	
21		Jumlah rumah tidak layak	6605	Dinas PRKP	

		huni			
22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	Dinas PRKP	
23		Rasio rumah dan KK	-	Dinas PRKP	
24		Jumlah rumah pembangunan baru	2.108	Dinas PRKP	
25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	-	Dinas PRKP	
26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	89.066	Dinas PRKP	
27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	Dinas PRKP	
28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	136.83	Dinas PRKP	
29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	23	Dinas PRKP	
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	Dinas PRKP	
31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	145	Dinas PRKP	
32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	145	Dinas PRKP	
33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Dinas PRKP	
1	<b>Trantimbumlinmas (POLPP)</b>	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	64	Satpol PP	
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	224	Satpol PP	
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	29	Satpol PP	
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11	Satpol PP	
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	3	Satpol PP	

6		Tersedianyasarana prasarana minimal	408	Satpol PP	
1	Trantibumlinmas (DAMKAR)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0.73	Disdamkar	
3		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
4		Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
5		Persentase jumlah aparaturnegara dan warga negara yang ikut pelatihan	0.22	Disdamkar	
6		Presentase warga negara yang ikut pelatihan	0.22	Disdamkar	
6		presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	-	Disdamkar	
7		Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	-	Disdamkar	
8		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap staus KLB	-	Disdamkar	
9		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamb untuk setiap status darurat bencana	-	Disdamkar	
10		presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Disdamkar	
11		presentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	2	Disdamkar	
12		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	161	Disdamkar	
13		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	5	Disdamkar	
14		Tersedianya aparaturnegara selama24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	85	Disdamkar	
15	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar,	Tidak ada	Disdamkar		



		sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			
16		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah 339 terdiri dari 19 jenis	Disdamkar	
17		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	48	Disdamkar	
18		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	235 orang	Disdamkar	
19		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	30 orang	Disdamkar	
1	<b>trantibumlinmas (SOSIAL)</b>	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	69	Dinas Sosial	
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	-	Dinas Sosial	
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	Dinas Sosial	
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang dijangkau	1098	Dinas Sosial	
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	652	Dinas Sosial	
7		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia/terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8	Dinas Sosial	
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	25	Dinas Sosial	

		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2	Dinas Sosial	
11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial	
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiatelantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	69	Dinas Sosial	
13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	Dinas Sosial	
14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2	Dinas Sosial	
15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	2193	Dinas Sosial	
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	Dinas Sosial	
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	Dinas Sosial	
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1	Dinas Sosial	
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	11	Dinas Sosial	
20		Jumlah penyandangdisabilitas terlan tar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	11	Dinas Sosial	

21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang Dirujuk	5	Dinas Sosial	
22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1196	Dinas Sosial	
23		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1196	Dinas Sosial	
24		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Dinas Sosial	
25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Dinas Sosial	
26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanandukungan psikososial	-	Dinas Sosial	
27		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	2 Jiwa	Dinas Sosial	
<b>Ketenagakerjaan</b>					
1		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	-	Dinas TTK dan UKM	
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-	Dinas TTK dan UKM	
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-	Dinas TTK dan UKM	
4		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	33.33	Dinas TTK dan UKM	
5		presentase instruktur bersertifikat kompetensi	38.39	Dinas TTK dan UKM	
6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	140	Dinas TTK dan UKM	
7		Persentase LPK yang memiliki perizinan	9.52	Dinas TTK dan UKM	
8		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas TTK dan UKM	
9		Jumlah penggaar yang dilatih	80	Dinas TTK dan UKM	
10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas TTK dan UKM	
11		Persentase penyerapan lulusan	52.25	Dinas TTK dan UKM	
12		Lulusan bersertifikat kompetensi	20	Dinas TTK dan UKM	
13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100	Dinas TTK dan UKM	

		yang diberikan Pelatihan			
13		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	20	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1.14	Dinas TKK dan UKM	
15		Data tingkat produktivitas total	-	Dinas TKK dan UKM	
16		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	22.68	Dinas TKK dan UKM	
17		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	22.68	Dinas TKK dan UKM	
18		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	160	Dinas TKK dan UKM	
19		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	15.03	Dinas TKK dan UKM	
20		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	281.27	Dinas TKK dan UKM	
21		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.31	Dinas TKK dan UKM	
22		Jumlah mogok kerja	1	Dinas TKK dan UKM	
23		Jumlah penutupan perusahaan	1	Dinas TKK dan UKM	
24		Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas TKK dan UKM	
25		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	Dinas TKK dan UKM	
26		Jumlah perselisihan PHK	52	Dinas TKK dan UKM	
27		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	101	Dinas TKK dan UKM	
28		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	-	Dinas TKK dan UKM	
29		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang Diberdayakan	42	Dinas TKK dan UKM	
30		Persentase perselisihan hubungan industrial yang	72.22	Dinas TKK dan UKM	

		diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
31		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1072	Dinas TKK dan UKM	
32		Jumlah pencari kerjayang terdaftar di kab/kota	2470	Dinas TKK dan UKM	
33		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	29	Dinas TKK dan UKM	
34		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10	Dinas TKK dan UKM	
36		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	-	Dinas TKK dan UKM	
37		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas TKK dan UKM	
38		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	11	Dinas TKK dan UKM	
39		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1005	Dinas TKK dan UKM	
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	-	Dinas TKK dan UKM	
41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	20	Dinas TKK dan UKM	
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan	-	Dinas TKK dan UKM	
43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100.00 %	Dinas TKK dan UKM	
44		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	Dinas TKK dan UKM	
45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	Dinas TKK dan UKM	
1	<b>Koperasi, usaha kecil dan menengah</b>	presentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk keoperasi dengan wilayah	-	Dinas TKK dan UKM	

		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas TKK dan UKM	
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.73	Dinas TKK dan UKM	
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24.09	Dinas TKK dan UKM	
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	54.55	Dinas TKK dan UKM	
6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.48	Dinas TKK dan UKM	
7		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	Dinas TKK dan UKM	
8		presentasi fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35	Dinas TKK dan UKM	
9		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31.82	Dinas TKK dan UKM	
10		presentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15.91	Dinas TKK dan UKM	
11		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10.91	Dinas TKK dan UKM	
12		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	0.91	Dinas TKK dan UKM	

		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
13		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	27.51	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	29.66	Dinas TKK dan UKM	
15		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	100	Dinas TKK dan UKM	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.14	Dinas TKK dan UKM	
17		presentae jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4.39	Dinas TKK dan UKM	
18		rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4.21	Dinas TKK dan UKM	
19		persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	2.58	Dinas TKK dan UKM	
1	<b>DPMPA</b>	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	39	Dinas PMPPA	
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	25	Dinas PMPPA	
3		jumlah medai massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas ppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Dinas PMPPA	
4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	Dinas PMPPA	
5		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	20.47	Dinas PMPPA	
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	5	Dinas PMPPA	
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	Dinas PMPPA	
8		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan pelatihan	37	Dinas PMPPA	
9		Jumlah kader perempuan tingkat	73	Dinas PMPPA	

		kabupaten/kota yang sudah dilatih			
10		Jumlah lembagayanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	9	Dinas PMPPA	
11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas PMPPA	
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas PMPPA	
13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3	Dinas PMPPA	
14		Persentase korbankekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas PMPPA	
1	<b>Pertanian</b>	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1849	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Prasarana pertanian yang digunakan	122	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	40	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		presentse fasilitas penanggulangan bencana	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Pangan</b>	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	14110	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	Dinas Pertanian dan Pangan	



4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergiziseimbang	15	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Tersedianya petaketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		Tertanganinya kerawananpangan	4	Dinas Pertanian dan Pangan	
7		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	14.583	Dinas Pertanian dan Pangan	
8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	84	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Perikanan</b>	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	48	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Persentase TempatPelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	28	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	82897500	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Pertanahan</b>	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	-	Data Nihil	
2		SK walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	-	Data Nihil	
3		SK Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	-	Data Nihil	
4		Dokumen izin membuka tanah	-	Data Nihil	

5		Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	-	Data Nihil	
1	<b>Lingkungan hidup</b>	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH)	44	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	85	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	49	Dinas Lingkungan Hidup	
4		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	11900294	Dinas Lingkungan Hidup	
5		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	14	Dinas Lingkungan Hidup	
6		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan Hidup	
7		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	-	Dinas Lingkungan Hidup	
8		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas Lingkungan Hidup	
9		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	41	Dinas Lingkungan Hidup	
1	<b>Disdukcapil</b>	Penerbitan akta perkawinan	139731	Disdukcapil	
2		Penerbitan akta perceraian	9.38	Disdukcapil	
3		Penerbitan akta kematian	12363	Disdukcapil	
4		penyajian data kependudukan	2	Disdukcapil	

1	<b>Keluarga Bencana</b>	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	Dinas PPKB	
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22	Dinas PPKB	
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	7.91	Dinas PPKB	
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	745	Dinas PPKB	
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5	Dinas PPKB	
6		presentasi fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	39.09	Dinas PPKB	
7		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18.9	Dinas PPKB	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	264	Dinas PPKB	
9		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	49.96	Dinas PPKB	
10		persentase kesertaan KB kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	50.61	Dinas PPKB	
11		Persentase kesertaan KB Penerima Bantuan Iuran (PBI)	61.1	Dinas PPKB	
1	<b>Perhubungan</b>	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100	Dinas Perhubungan	
2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	147.85	Dinas Perhubungan	
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Dinas Perhubungan	
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	34.24	Dinas Perhubungan	
1	<b>Penanaman Modal</b>	Perda mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang	-	DPMPTSP	

		menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	
4		Kegiatan semunar bisnis, forum, one on one meeting	15	DPMPTSP	
5		Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	DPMPTSP	
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	15	DPMPTSP	
8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	9802	DPMPTSP	
9		Laporan realisasi penanaman modal	653.18	DPMPTSP	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	200	DPMPTSP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	411	DPMPTSP	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	39	DPMPTSP	
1	<b>Pemuda dan olahraga</b>	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100	DISPORA	
2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	DISPORA	
3		Jumlah pemuda mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	420	DISPORA	
4		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	DISPORA	
5		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	14	DISPORA	
6		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	DISPORA	
1	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah	49.51	DISKOMINFO	

		atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan yang disediakan oleh dinas kominfo			
2		presentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang di sediakan dinas kominfo	47.57	DISKOMINFO	
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	iya	DISKOMINFO	
4		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	98.28	DISKOMINFO	
5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DISKOMINFO	
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DISKOMINFO	
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	DISKOMINFO	
8		presentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	18.75	DISKOMINFO	
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan undang-undang	100	DISKOMINFO	
10		presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	10.53	DISKOMINFO	
11		presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DISKOMINFO	

12		Persentase perangkat daerah yang menyimpandata di pusat data pemerintah	100	DISKOMINFO	
13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	DISKOMINFO	
14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	DISKOMINFO	
15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	DISKOMINFO	
16		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	37.84	DISKOMINFO	
17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	DISKOMINFO	
18		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	DISKOMINFO	
19		presentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	166.67	DISKOMINFO	
20		Presentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanaka sesuai dengan strtegi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah di tetapkan	100	DISKOMINFO	
<b>Persandian</b>					
1		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	DISKOMINFO	
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	91.43	DISKOMINFO	
3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0.00	DISKOMINFO	
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik	100	DISKOMINFO	

		pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan			
1	<b>Statistik</b>	Tersedianya buku profil daerah	5	DISKOMINFO	
2		Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	2	DISKOMINFO	
3		Jumlah kompilasi statistiksektoral yang dilakukan	114	DISKOMINFO	
4		Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	DISKOMINFO	
5		Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	DISKOMINFO	
6		presentase kelengkapn meta data kegiatan statistik sektoral	-	DISKOMINFO	
7		presentase kelengkapan metadata variable sektoral	-	DISKOMINFO	
1	<b>Pariwisata</b>	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	26	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	26	Dinas Pariwisata	
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	50	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3136	Dinas Pariwisata	
5		Jumlah promosievent daerah yang terlaksanadi dalam negeri	2	Dinas Pariwisata	
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata	
7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	51	Dinas Pariwisata	
8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	30	Dinas Pariwisata	
9		presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Pariwisata	
10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha	9	Dinas Pariwisata	

		masyarakat			
1	<b>Kebudayaan</b>	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (investasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (enyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	Dinas Pariwisata	
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	246	Dinas Pariwisata	
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1	Dinas Pariwisata	
6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	Dinas Pariwisata	
7		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Dinas Pariwisata	
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Pariwisata	
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	Dinas Pariwisata	
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pariwisata	
11		peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan -sarana dan -praasarana -museum	-	Dinas Pariwisata	
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan	-	Dinas Pariwisata	



		pemanfaatan koleksi museum			
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Dinas Pariwisata	
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	Dinas Pariwisata	
1	<b>Kearsipan</b>	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2.69	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	2.85	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1139	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
7		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	1157	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
9		Pencarian arsipstatis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	

		NSPK			
10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
<b>Perpustakaan</b>					
1	<b>Perpustakaan</b>	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9.56	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.31	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.65	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	33	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
<b>Perindustrian</b>					
1	<b>Perindustrian</b>	Presentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		presentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5		presentase data perusahaan industri di Kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	0.18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

1	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		presentasi penerbitan TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		presentase penerbitan STPW yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0.98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
10		presentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	96.61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
11		presentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	43,57%	Dinas Pendidikan	
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93.57%	Dinas Pendidikan	
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	71.37%	Dinas Pendidikan	
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.82%	Dinas Pendidikan	

1	<b>Kesehatan</b>	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,26%	Dinas Kesehatan	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	58.82%	Dinas Kesehatan	
3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	
4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	
5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.10%	Dinas Kesehatan	
8		persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92.02%	Dinas Kesehatan	
10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84.09%	Dinas Kesehatan	
11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	125%	Dinas Kesehatan	
12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
13		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
14		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1	<b>Pekerjaan Umum</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	14.34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	54.94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94.69%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16.22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91.62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	45.9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	72.22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	<b>Perumahan Rakyat</b>	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	37.02%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	4.21%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1.39%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1	<b>Trantibumlinmas (POL PP)</b>	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
2		persentase perda dan perkara yang ditegakan	100%	Satpol PP	
1	<b>Trantibumlinmas (DAMKAR)</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2125	Damkar	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	625	Damkar	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Damkar	
4		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Damkar	
5		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14.4	Damkar	
1	<b>Trantibumlinmas (SOSIAL)</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	80%	Dinas Sosial	

		terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
1	<b>Ketenagakerjaan</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.03%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7421072045145.1	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	26.68%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
5		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	40.68%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	26.36 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	92.77%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	<b>Perlindungan perempuan dan perlindungan anak</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	27.50%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17.14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	<b>Pertanian</b>	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	480.15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-99.50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

1	<b>Pangan</b>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	68.33%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	<b>Perikanan</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	2.78%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	<b>Pertanahan</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	18.42%	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	
3		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	50	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	<b>Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	58	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	75.26	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	83	Dinas Lingkungan Hidup	
1	<b>Disdukcapil</b>	Perekaman KTP Elektronik	99,43 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45,43 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

				Sipil	
3		Kepemilikan akta kelahiran	99,72 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	53,65 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	<b>Keluarga Bencana</b>	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	55.20 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16.86 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
1	<b>Perhubungan</b>	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.73	Dinas Perhubungan	
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.35	Dinas Perhubungan	
1	<b>Penanaman Modal</b>	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	- 1.219%	Dinas Penanamam Modal	
1	<b>Pemuda dan Olahraga</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.80 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.14 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3		Peningkatan Prestasi Olahraga	13	Dinas Pemuda dan Olahraga	
1	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	49.51 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80.48%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
3		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74,173 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Persandian</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75.86 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	



1	<b>Statistik</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Pariwisata</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10.15 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-- 72.49%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3		Tingkat Hunian Akomodasi	5.57%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Di lampirkan surat keterangan
5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2614	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	<b>Kebudayaan</b>	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	<b>Kearsipan</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban pasal 40 dan pasal 29 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	18%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1,33%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	<b>Perpustakaan</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60.38	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	<b>Perindustrian</b>	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4.42%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	116.66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	<b>Perdagangan</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96.90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

## 2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Perencanaan keuangan</b>	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	31.61 %	Badan Pengeloaah Keuangan Daerah	
2		Rasio PAD	2013.34 %	Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah	
3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality	Inspektorat Kota Jambi	

			Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:		
4		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:	Inspektorat Kota Jambi	
5		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	68.20 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
7		Opini Laporan Keuangan	Ada 10	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
1	<b>Keuangan</b>	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	11.30 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	15.75%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
3		Assets Management	Iya	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
4		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9.42%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
1	<b>Pengadaan</b>	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0.59%	Unit Pelayanan Pengadaan	
2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2.44 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	99.16 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
1	<b>Kepegawaian</b>	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	322.22 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,35%	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75.92 %	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolak ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan

diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	$\geq 91$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	

4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

#### b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2021.

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	-	2,9	1,69	58,27%	2,44
2.	Indeks profesionalitas ASN	55	116%	63,08	64,24	101,84%	88,00
3.	Nilai SAKIP	B	94,3%	B	-	-	A
4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	94,85%	3,73	-	-	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	99,43%	87,00%	86,05%	99,43%	88,5%
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82,00%	93,75%	75%	79%	105,33%	60,00%
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	93,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	243,00%	20,00%	21,74%	108,7%	20,00%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	107,88%	70,61%	74,76%	105,88%	85,79%
11.	Indeks kualitas air	32,11	103,40	39,75	43,99	110,6%	43,38
12.	Indeks kualitas udara	80,68	104,70	80,74	85,02	105,3%	91,45
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	107,48	42	49,91	118,8%	61,37
14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	223,52%	68%	37,92%	55,76%	100,00%
15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	100,55%	91,6%	86,7%	94,65%	92,5%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	96,21%	2,29%	3,15%	137,55%	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	-107,11%	9,00%	7,97	88,55%	9,00%
18.	Realisasi investasi	410 M	68,39%	474,62 M	653,17 M	137,62%	523,37 M
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	98,27%	65,50%	63,12%	96,36%	66,00%
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	100,00%	9,02%	9,02%	100,00%	10,00%
21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	52,34%	6,5%	1,64%	25,23%	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	101,46%	23,85%	26,36%	110,52%	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	100,41%	72,36	72,71	100,48	72,37%
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	103,35%	15,11	15,37	101,72	14,64%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	100,00%	12,32	12,32	100,00%	4,32%
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	102,15%	10,93	11,20	102,15%	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	1,05	104,76%	1,03	0,74	128,16%	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	96,46	99,52%	96,69%	96,83%	100,14%	97,15%

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,73%	94,93	94,42	99,46%	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,39%	68,30	-	-	68,50
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	90%	80%	88,88%	100,00%
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	96,29%	63%	87%	138,09%	66%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	100,00%	57,9	57,91	100,00%	52,00
34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	96,09%	70%	80%	114,28%	85,00%

Sumber: LKJ Perangkat Daerah Diolah Bagian Organisasi (2021)

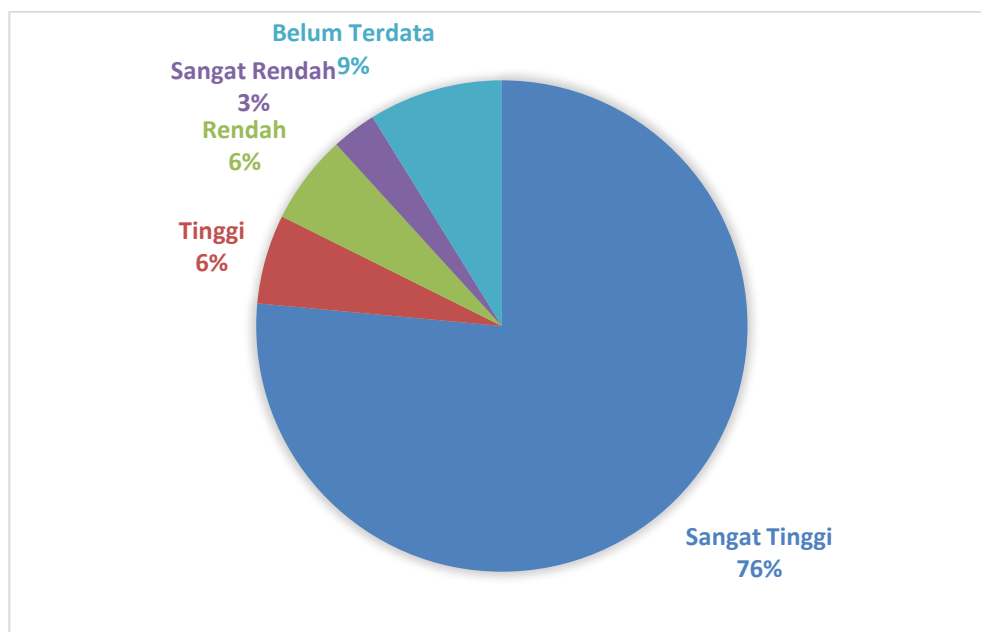
Catatan :

- IKU Nomor 3 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari KemenPAN RB, pada saat penyusunan LKJ nilai belum dirilis
- IKU Nomor 4 tidak dapat diisi karena KemenPAN RB pertahun 2021 tidak lagi mengeluarkan nilai Indeks Survey Persepsi Korupsi yang dialihkan menjadi angka/indeks dari Survey penilaian integritas (SPI) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh KPK.
- IKU Nomor 30 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari BPS Kota Jambi, pada saat penyusunan LKJ nilai belum dirilis

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2021, **26 indikator menunjukkan capaian  $\geq 91\%$  atau lebih** masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2021, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat **26 indikator menunjukkan capaian SANGAT TINGGI**, **2 indikator menunjukkan capaian Tinggi**, **0 indikator capaian Sedang**, **2 indikator capaian Rendah**, **1 indikator capaian Sangat Rendah** dan **3 Indikator BELUM TERDATA**.

Persentase Pencapaian IKU Tahun 2021



#### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan pada Tabel diatas di poin b dapat di sampaikan bahwa semua indikator yang telah di capai dari Tahun 2020-2021 dengan realisasinya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

#### d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan pada Tabel diatas di poin b dapat di sampaikan bahwa semua indikator yang telah di capai dari Tahun 202 – 2021 dengan realisasinya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

#### e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang disajikan dalam



tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai 19,91%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara yang hanya memiliki tingkat efisiensi 15,40%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

#### **f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya analisis atas efisiensi penggunaan daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Adanya sumber dana baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR dunia usaha
- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota layak anak
- Tanggung jawab dari gugus tugas kota layak anak dalam pemenuhan hak anak
- Dukungan dari dunia usaha dalam bentuk dana dan program kegiatan
- Dukungan dari media dalam pengembangan kota layak anak
- Dukungan dari masyarakat dalam perwujudan kota layak anak
- Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perwujudan KLA
- Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat
- Program inovasi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian kota layak anak.

## **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **4.1 URUSAN PENDIDIKAN**

#### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Permendagri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1:

- Ayat 4 : Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- Ayat 8 Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- Ayat 9 Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Selanjutnya pada Bab II Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bagian Kesatu Umum Pasal 3 ayat 2 Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan urusan wajib pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan kesetaraan;

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

#### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>B NILAI</b>	<b>334,421,038,874</b>	<b>B NILAI</b>	<b>300,978,711,773</b>	<b>90.00</b>			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (A)	NILAI AKIP (A)	824,234,059	NILAI AKIP (A)	550,906,720	66.84			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat disusun	4 dokumen	692,967,529	4 dokumen	419,942,620	60.60	90.00	Meningkatnya Pandemi Covid-19, menyebabkan sosialisasi dan coaching clinic dengan Narasumber Pusat/Kementerian tidak terlaksana	Penyesuaian kegiatan/anggaran sosialisasi dan coaching clinic dengan Narasumber Pusat/Kementerian untuk Tahun Anggaran 2022
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	1 dokumen	17,224,800	1 dokumen	17,178,600	99.73	100.00		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindaknya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	114,041,730	4 Dokumen	113,785,500	99.78	100.00		
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>327,957,061,719</b>	<b>100%</b>	<b>295,615,323,938</b>	<b>90.14</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2699 orang	326,897,822,369	2699 orang	294,902,472,995	90.21	100.00		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2699 orang	1,084,050	2699 orang	1,036,800	95.64	100.00		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85 dokumen	885,226,900	85 dokumen	638,489,400	72.13	100.00		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	162,285,000	12 dokumen	66,723,743	41.12	100.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	5,787,300	1 dokumen	2,577,000	44.53	100.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2,829,000	12 dokumen	2,113,000	74.69	100.00		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2,027,100	1 dokumen	1,911,000	94.27	100.00		
				<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,143,013,650</b>	<b>100%</b>	<b>977,103,450</b>	<b>85.48</b>			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3,422,700	1 Dokumen	600,000	17.53	100.00		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	767 Unit Rumah Dinas	80,415,400	767 Unit Rumah Dinas	79,474,600	98.83	100.00		
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	-	0.00	100.00		
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Daerah	189 Satuan Pendidikan	24,000,000	189 Satuan Pendidikan	11,625,000	48.44	100.00		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik daerah	12 Dokumen	8,847,500	12 Dokumen	7,847,350	88.70	100.00		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1,021,978,050	12 Dokumen	875,006,500	85.62	100.00		
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,550,000	1 Dokumen	2,550,000	100.00	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>177,384,900</b>	<b>100%</b>	<b>176,599,400</b>	<b>99.56</b>			
				gadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161 stel	117,650,000	161 stel	117,364,500	99.76	100.00		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implmentasi Peraturan PerundangUndangan	1 kali	59,734,900	1 kali	59,234,900	99.16	100.00		
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1,816,229,147</b>	<b>100%</b>	<b>1,357,450,528</b>	<b>74.74</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 buah/pcs	7,656,000	50 buah/pcs	6,960,000	90.91	100.00		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor	4 Jenis	766,639,800	4 Jenis	748,342,900	97.61	100.00		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	194,407,747	1 tahun	185,425,807	95.38	100.00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	112.000 lembar	44,385,000	112.000 lembar	17,754,177	40.00	100.00		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	1 tahun	30,000,000	1 tahun	16,350,000	54.50	100.00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	80 kali	773,140,600	80 kali	382,617,644	49.49	100.00		
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>479,050,000</b>	<b>100%</b>	<b>435,600,000</b>	<b>90.93</b>			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	479,050,000	1 unit	435,600,000	90.93	100.00		
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>564,940,400</b>	<b>100%</b>	<b>480,245,467</b>	<b>85.01</b>			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	8 rekening 8 rekening 5 rekening	263,000,000	8 rekening 8 rekening 5 rekening	197,487,367	75.09	100.00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	11 orang	301,940,400	10 orang	282,758,100	93.65	100.00		
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,459,124,999</b>	<b>100%</b>	<b>1,385,482,270</b>	<b>94.95</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	48,000,000	1 unit	46,139,600	96.12	100.00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	107 unit	633,989,999	107 unit	589,582,034	93.00	100.00		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	30 unit	42,185,000	30 unit	17,539,636	41.58	100.00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	1 unit	734,950,000	1 unit	732,221,000	99.63	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD</b>	99.49 Persen	144,797,798,435	99.49 Persen	136,009,244,898	93.93			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	90%	94,571,417,529	90%	89,566,014,922	94.71			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan RuangUKS	11 SD	1,446,950,000	11 SD	908,174,814	62.76	71.43	Ruang UKS direncanakan 11 SD, terlaksana 7 SD (4 SD tidak ada lokasi)	Infentarisasi sertifikat sekolah terhadap kepemilikan lahan dan evaluasi dalam perencanaan
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunanperpustakaan sekolah	7 SD	2,058,000,000	7 SD	845,561,693	41.09	55.00	Ruang Perpustakaan direncanakan 7 SD, terlaksana 3 SD (4 SD tidak ada lokasi)	Infentarisasi sertifikat sekolah terhadap kepemilikan lahan dan evaluasi dalam perencanaan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan saranaprasarana dan utilitas sekolah	18 SD	2,424,300,002	18 SD	2,409,934,402	99.41	100.00		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan meubelsekolah	56 SD	3,365,374,100	56 SD	2,644,965,200	78.59	90.00	Pengadaan Mebeleur dan Sarana Prasarana SDN 175/IV tidak terealisasi, dikarenakan : • Barang yang dibutuhkan melalui proses pengadaan e-Purchasing (e-Catalogue) telah turun tayang dan tidak dapat untuk diproses. • Tidak cukup waktu melaksanakan proses pengadaan melalui e-Tender dengan batas waktu kontrak maksimal adalah tanggal 15 Desember 2021.	Mengupayakan penganggaran kembali pada anggaran murni Tahun 2022
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang mendapatkan bantuanpenyediaan biaya personil	1409 peserta didik SD	885,695,239	1409 peserta didik SD	727,027,490	82.09	100.00	Peserta didik penerima bantuan yang diakui harus terdata pada DKTS	Mendorong sekolah untuk mendaftarkan siswa tidak mampu untuk masuk ke dalam data DTKS
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan alat praktikdan peraga siswa	67 SD	17,760,067,000	67 SD	16,897,729,803	95.14	100.00		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD yang mendapatkan fasilitasi peningkatankualitas KBM kurikulum 2013	100 SD	76,924,594	100 SD	60,124,594	78.16	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SD yang berprestasi akademik non akademik	489 Orang	582,953,961	489 Orang	305,413,110	52.39	100.00	Pandemi Covid-19 banyak perlombaan tidak dilaksanakan oleh Kementerian dan pertandingan dilaksanakan secara daring/online menyebabkan anggaran makan minum, cendramata dan honor juri perlombaan tidak terealisasi	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan lomba siswa dengan kondisi PTM dan penerapan level PPKM
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD	1674 Orang	24,450,509,280	1674 Orang	24,150,241,100	98.77	100.00		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Bersertifikat Kepala Sekolah (NUKS)	250 orang	811,911,840	250 orang	-	0.00	0.00		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	250 orang	13,623,600	250 orang	13,623,600	100.00	100.00		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan pengelolaan dana BOS sekolah dasar	164 SD	40,611,884,913	164 SD	40,547,224,116	99.84	100.00		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	164 SD	83,223,000	164 SD	55,995,000	67.28	100.00		
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>	<b>85%</b>	<b>39,432,636,596</b>	<b>85%</b>	<b>37,907,595,121</b>	<b>96.13</b>			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5 SMP	2,786,343,000	5 SMP	2,735,534,682	98.18	100.00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2 SMP	83,090,000	2 SMP	82,301,871	99.05	100.00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 satuan pendidikan	241,660,000	1 satuan pendidikan	230,420,000	95.35	100.00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1 SMP	323,184,000	1 SMP	317,156,092	98.13	100.00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 SMP	1,367,641,522	8 SMP	1,179,744,603	86.26	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pengadaan Mebel Sekolah	Diselenggarakan oleh Masyarakat		966,369,700	0	561,935,350	58.15	100.00	Pengadaan Mebeleur dan Sarana Prasarana SMPN 26 tidak terealisasi, dikarenakan : • Barang yang dibutuhkan melalui proses pengadaan e-Purchasing (e-Catalogue) telah turun tayang dan tidak dapat untuk diproses. • Tidak cukup waktu melaksanakan proses pengadaan melalui e-Tender dengan batas waktu kontrak maksimal adalah tanggal 15 Desember 2021.	Mengupayakan penganggaran kembali pada anggaran murni Tahun 2022
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil	1000 Peserta Didik SMP	1,324,534,710	1000 Peserta Didik SMP	1,118,438,010	84.44	100.00	Peserta didik penerima bantuan yang diakui harus terdata pada DKTS	Mendorong sekolah untuk mendaftarkan siswa tidak mampu untuk masuk ke dalam data DTKS
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 SMP	1,691,948,000	6 SMP	1,632,993,153	96.52	100.00		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terseleenggaranya Ujian Sekolah bagi Peserta Didik SMP dan penyusunan soal US	5 Mapel	100,834,400	5 Mapel	77,865,400	77.22	100.00		
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan SMP Negeri	25 SMP	202,077,970	25 SMP	200,817,700	99.38	100.00		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SMP yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	230 Peserta Didik SMP	382,750,410	230 Peserta Didik SMP	243,912,300	63.73	100.00	Pandemi Covid-19 banyak perlombaan siswa dilaksanakan secara daring sehingga, pbelanja ATK, Photo copy, honor juri dan belanja hadiah tidak bisa terealisasi sepenuhnya, serta kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November setelah PPKM level 1 (PTM)	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan lomba siswa dengan kondisi PTM dan penerapan level PPKM
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP	469 Orang	7,715,055,141	469 Orang	7,572,392,510	98.15	100.00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru/Pendidik SMP yang mendapatkan Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru dan Penguatan MGMP	185 orang	158,323,897	185 orang	100,355,500	63.39	100.00	Penguatan MGMP tidak dapat dijalankan terkendala Pandemi Covid-19 menyebabkan anggota dan pengurus MGMP kurang aktif mengadakan pertemuan diluar jam mengajar sehingga penguatan MGMP belum dapat terlaksana untuk tahun 2021	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan pengelolaan dana BOS SMP	25 SMP	21,968,331,380	25 SMP	21,739,085,530	98.96	100.00		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP	25 SMP	120,492,466	25 SMP	114,642,420	95.14	100.00		
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>	<b>65%</b>	<b>8,694,651,310</b>	<b>65%</b>	<b>6,884,066,195</b>	<b>79.18</b>			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang memperoleh	1000 peserta didik PAUD	136,709,400	1000 peserta didik PAUD	16,714,800	12.23	15.00	Belum adanya Peraturan Walikota Jambi yang mengatur tentang Bantuan PAUD bagi peserta didik pada yayasan/swasta (bantuan Sarana dan prasarana, bantuan anak tidak mampu). Sedangkan Data anak kurang mampu yang berasal dari data DTKS berusia 5-6 tahun tidak mencukupi	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Inspektorat Kota Jambi, serta telah diprosesnya pembuatan regulasi pendukung (Peraturan Walikota Jambi)
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Guru PAUD yang memperoleh pembinaan/pembelajaran	55 Guru PAUD	67,213,994	55 Guru PAUD	66,766,340	99.33	100.00		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD	300 Orang	794,359,110	300 Orang	783,861,100	98.68	100.00		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat pembinaan/kelembagaan dan manajemen PAUD	345 PAUD	291,340,530	345 PAUD	272,412,200	93.50	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan pengelolaan danaBOP PAUD	345 PAUD	7,405,028,276	345 PAUD	5,744,311,755	77.57	100.00	Sesuai Juknis, bahwa penarikan data penerima BOP PAUD Tahap 2 berdasarkan Cut Off Data Dapodik 31-09-2021, dan masih ditemukan Satuan Pendidikan menginput data melebihi batas waktu Cut off sehingga datanya tidak bisa dihitung sebagai penerima BOP (terjadinya Silpa )	Meningkatkan koordinasi dan penegasan terhadap Satuan PAUD dalam mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	72.90 persen	2,099,093,000	72.90 persen	1,651,568,660	78.68			
				Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan perlengkapan pendidikan	300 Peserta Didik	40,099,400	300 Peserta Didik	-	0.00	25.00	Belum adanya Peraturan Walikota Jambi yang mengatur tentang Bantuan Kesetaraan bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Peserta Didik Kesetaraan Umur7-15 tahun banyak yang berasal dari Luar Kota Jambi sehingga Kuota tidak terpenuhi	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Inspektorat Kota Jambi, serta telah diprosesnya pembuatan regulasi pendukung (Peraturan Walikota Jambi)
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	60 Siswa PNF/Kesetaraan	36,000,000	60 Siswa PNF/Kesetaraan	-	0.00	25.00	Belum adanya Peraturan Walikota Jambi yang mengatur tentang Bantuan Kesetaraan bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Peserta Didik Kesetaraan Umur7-15 tahun banyak yang berasal dari Luar Kota Jambi sehingga Kuota tidak terpenuhi	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Inspektorat Kota Jambi, serta telah diprosesnya pembuatan regulasi pendukung (Peraturan Walikota Jambi)
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak putus sekolah yang memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup	140 Peserta Didik PKH	34,354,626	140 Peserta Didik PKH	32,464,800	94.50	100.00		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	85,894,354	16 Orang	85,412,540	99.44	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mendapatkan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	14 PNF/Kesetaraan	1,902,744,620	14 PNF/Kesetaraan	1,533,691,320	80.60	100.00	Sesuai Juknis, data penerima BOP PAUD Tahap 2 berdasarkan Cut Off Data Dapodik 31-09-2021. Terdapat 1 Satuan Pendidikan (PKBM Istanaku) yang menolak BOP Tahap 2 (terjadinya Silpa)	Meningkatkan koordinasi dan penegasan terhadap Satuan PNF/PKBM dalam mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL</b>	<b>75 Persen</b>	<b>27,574,820</b>	<b>75 Persen</b>	<b>22,207,500</b>	<b>80.54</b>			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	86%	27,574,820	86%	22,207,500	80.54			
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan dasar (Tingkat SD)	1 Buku	27,574,820	1 Buku	22,207,500	80.54	100.00		
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>5 Persen</b>	<b>33,914,585</b>	<b>5 Persen</b>	<b>33,862,900</b>	<b>99.85</b>			
				Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	33,914,585	100%	33,862,900	99.85			
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40 PAUD dan PNF	33,914,585	40 PAUD dan PNF	33,862,900	99.85	100.00		
<b>JUMLAH</b>							<b>479,280,326,714</b>		<b>437,044,027,070</b>	<b>91.19</b>			

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasi dan belanja modal ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

APBD;

APBN; dan

Sumber dana lain yang sah.

Pada Tahun 2021 Anggaran Belanja OPD Dinas Pendidikan Kota Jambi adalah sebesar Rp. 479,280,326,714,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 423,056,795,642,00 dan Belanja Modal Rp. 56,223,531,072,00 Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2020 sebesar Rp. 444.640.003.953,00 maka tahun 2021 ini Belanja mengalami kenaikan sebesar Rp. 34,640,322,761,00 atau sebesar 7,79 %. Realisasi sebesar Rp. 437,044,027,070,00 atau sebesar 91,19 % dengan rincian pada tabel berikut :

##### Komposisi Belanja OPD Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	423,056,795,642,00	384,355,057,174,00	90,85
2	Belanja Modal	56,223,531,072,00	52,688,969,897,00	93,71
<b>Total Anggaran</b>		<b>479,280,326,714,00</b>	<b>437,044,027,070,00</b>	<b>91,19</b>

##### Komposisi Belanja Operasi sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	328,291,837,169,00	296,051,913,330,00	90,18
2	Belanja Barang dan Jasa	86,117,858,473,00	81,551,543,844,00	95,03
3	Belanja Hibah	8,647,100,000,00	6,751,600,000,00	78,08
<b>TOTAL</b>		<b>423,056,795,642,00</b>	<b>384,355,057,174,00</b>	<b>90,85</b>

Belanja Modal pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 56,223,531,072,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 52,688,969,897,00 atau 93,71 %. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,859,811,543.00	31,176,898,758.00	94.88
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,692,061,002.00	8,866,750,734.94	82.93
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,671,658,527.00	12,645,320,404.00	99.79
<b>TOTAL</b>		<b>56,223,531,072,00</b>	<b>52,688,969,897,00</b>	<b>93,71</b>

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

NO	NAMA	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	H. MULYADI, S.Pd, M.Pd NIP. 19710616 199801 1 001	KEPALA DINAS	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2
2	Hj. RITA KURNIAWATI, SE, ME NIP. 19650615 199903 2 003	SEKRETARIS	Pembina (IV/a)	S2
3	IWAN RIFALDO, S.Pd NIP. 19790319 200801 1 004	Kasubbag Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Penata (III/c)	S1
4	HENDRA HELFIYANTO, SE NIP. 19690707 199002 1 001	Analisis Perencanaan Anggaran	Pembina (IV/a)	S1
5	ERWIN ROSIYAN NIP. 19730913 201407 1 001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Penata Muda (III/a)	S1
6	ELYA KASMITA, SH NIP. 19670927 199203 2 003	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan PTP	Penata Tk.I (III/d)	S1
7	GANES YANDRA PUTRA, S.H NIP. 19630715 199003 1 005	Pranata Kearsipan	Penata Tk.I (III/d)	S1
8	HANDRA ANWAR, S.Pd.I, M.Pd NIP. 19830424 201001 1 015	Pengelola Kepegawaian	Penata (III/c)	S2
9	MARDIANY NIP. 19660923 198811 2 002	Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
10	MUHAMMAD ZEN NIP. 19660908 198603 1 006	Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
11	HAFIZUL NIP. 19630307 198203 1 005	Pengadministrasi Umum	Pengatur (II/c)	SMA
12	BUDI WICAKSONO NIP. 19710920 199002 1 001	Pramu Kebersihan	Pengatur (II/c)	SMA
13	SUWARMAN NIP. 19650831 199309 1 001	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda (II/a)	SMA
14	SYAMSUL BAHRI NIP. 19640923 201212 1 001	Petugas Keamanan	Pengatur Muda (II/a)	SMA
15	MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si NIP. 19740415 199903 1 004	Kasubbag Keuangan dan BMD	Pembina Tk.I (IV/b)	S2
16	HENIMARDIANI, S.Pd NIP. 19800825 201407 2 006	Bendahara	Penata Muda (III/a)	S1
17	TRIMARLENI, S.Pd NIP. 19790308 201407 2 007	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penata Muda (III/a)	S1

18	HUSNA MARLIANA, SE, ME NIP. 19870319 200901 2 003	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III/b)	S2
19	YANTI, SE, ME NIP. 19830104 200902 2 004	Penata Laporan Keuangan	Penata (III/c)	S2
20	ROY MARTEN, S.Pd NIP. 19820318 201407 1 001	Pengolah Daftar Gaji	Penata Muda (III/a)	S1
21	M.FAUDI RAMADWIPA, SE NIP. 19950526 201903 1 003	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda (III/a)	S1
22	HASANAH, S.Pd NIP. 19850111 201407 2 005	Pengolah Daftar Gaji	Penata Muda (III/a)	S1
23	YETI OKTAVIANI NIP. 19801017 201407 2 001	Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SMA
24	Dra. LILYARUDFA, M.Pd NIP. 19650703 198902 2 001	Kabid Pembinaan Paud, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pembina (IV/a)	S2
25	WIKO HARYANTO, S.Pd NIP. 19790130 200902 1 001	Kasi Pengelolaan PNF	Penata Muda Tk.I (III/c)	S1
26	FARIDA NIP. 19631017 198602 2 002	Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
27	DESI, SH NIP. 19751203 200801 2 005	Kasi Pngelolaan PAUD	Penata Tk.I (III/d)	S1
28	ABDULLAH ALMAHDI, S.Ag NIP. 19750525 200212 1 003	Analisis Sarana PAUD	Penata Tk.I (III/d)	S1
29	RIA PRANCISKA TURISIA, S.Pd NIP.19821114 201407 2 004	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Penata Muda (III/a)	S1
30	YURNALISMAR, SE NIP. 19691128 201212 2 001	Analisis Peserta Didik	Penata Muda (III/a)	S1
31	IWAN RIFALDO, S.Pd NIP. 19790319 200801 1 004	Kasi Pemetaan PAUD, PNF & Pengendalian Perizinan	Penata (III/c)	S1
32	JUNI, S.Pd NIP. 19660601 199602 1 001	Penyusun Data Peserta Didik	Penata Tk.I (III/d)	S1
33	SUGIYONO, S.Pd, M.Pd NIP. 19720202 199303 1 005	Kabid Pembinaan SD	Pembina (IV/a)	S2
34	ABDUL LATIP, SE NIP. 19670808 199403 1 008	Kasi Sarana dan Prasarana SD	Penata Tk.I (III/d)	S1
35	EVI WANI NIP. 19730903 201212 2 002	Pengelola Sarana dan Prasarana SD	Pengatur (II/c)	D-III
36	ANDI YULIANA SUKMAWATI, SE NIP. 19770731 201407 2 003	Analisis Sarana dan Prasarana SD	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
37	AZWARMAN NIP. 19720301 201407 1 004	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SD	Pengatur Muda (II/a)	SMA
38	ERNA FITRIANI, M.Pd.I NIP. 19721110 199403 2 007	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SD	Pembina (IV/a)	S2
39	DINA FAUZIYAH, S.Kom NIP. 19841011 201407 2 003	Analisis Peserta Didik	Penata Muda (III/a)	S1
40	MUHAMMAD, S.Ag NIP. 19671214 198603 1 001	Analisis Peserta Didik	Pembina (IV/a)	S1

41	INRIKO FARDIAN, M.Pd NIP. 19720814 200501 1 009	Kasi Kelembagaan dan Manajemen SD	Penata (III/c)	S2
42	SAJAR KN NIP. 19631231 198203 1 046	Pengadministrasi Kurikulum	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
43	JUNIARTI, S.Pd.I NIP. 19860627 201407 2 002	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Penata Muda (III/a)	S1
44	SUPARDI, SE NIP. 19670814 198901 1 002	Kabid Pembinaan SMP	Pembina (IV/a)	S1
45	YULIANTO, M.Pd NIP. 19700701 199803 1 005	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Pembina (IV/a)	S2
46	SARI PUSPITA, SE NIP. 19770828 201001 2 004	Analisis Peserta Didik	Penata (III/c)	S1
47	BAWADI NIP. 19660707 199403 1 007	Pengadministrasi Peserta Didik	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
48	SUPRIATI, M.Pd NIP. 19680609 199003 2 002	Kasi Kelembagaan dan Manajemen SMP	Penata Tk. I (III/d)	S2
49	SUD ANGGARA NIP. 19840424 200312 2 005	Pengadministrasi Kurikulum	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA
50	YENNY ROSLINDAWATI, S.Pd NIP. 19710416 199401 2 001	Analisis Pelaksana Kurikulum Pendidikan	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
51	RD. SARWANI, SH, MPA NIP. 19671210 199602 1 003	Kasi Sarana dan Prasarana SMP	Pembina (IV/a)	S2
52	MUHAMMAD ALAMSYAH, SS NIP. 19821028 201101 1 004	Analisis Sarana dan Prasarana SMP	Penata (III/c)	S1
53	EKA SETIAWAN NIP. 19750818 199403 1 001	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SMP	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
54	M. AZMI, S.Pd NIP. 19841222 200904 1 001	Pengelola Sarana dan Prasarana SMP	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
55	ZULAFNI, S.Pd, M.Pd NIP. 19700316 199303 1 008	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Pembina Tk.I (IV/b)	S2
56	RUKSAH EKA DEWI, SH NIP. 19680522 199702 2 001	Kasi PTK dan Kurikulum Mulok PAUD dan PNF	Penata Tk.I (III/d)	S1
57	NANI NAFSANI, S.Pd NIP. 19630331 1986022 002	Analisis Kebutuhan PTK	Penata TK.I (III/d)	S1
58	MAIDIANA NIP. 19640508 198403 2 001	Pengadministrasi PTK	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA
59	DEDI MANSYAH, S.Pd NIP. 19851210 201407 1 002	Analisis Data dan Informasi PTK	Penata Muda (III/a)	S1
60	MUHAMAD HARYADI, S.Pd NIP. 19660123 198902 1 001	Kasi PTK dan Kurikulum Mulok SD	Penata Tk.I (III/d)	S1
61	SITI ROSMALA DEWI NIP. 1964 1206 198503 2 003	Pengadministrasi Sertifikasi	Penata Muda (III/a)	SMA
62	EKO SAPRIANTO SN, SH NIP. 19861018 201407 1 002	Analisis Kualifikasi dan Karir PTK	Penata Muda (III/a)	S1
63	ADE IRAWAN, S.Kom NIP. 19810121 201407 1 003	Analisis Data dan Informasi PTK	Penata Muda (III/a)	S1
64	NUR ALAMSYAH, SE NIP. 19680222 199303 1 011	Kasi PTK dan Kurikulum Mulok SMP	Penata Tk.I (III/d)	S1
65	LUTFI ANSORY, S.Pd.I NIP. 19830323 200903 1 009	Analisis Data dan Informasi PTK	Penata Tk. I (III/d)	S1
66	JOKO SYARIFUDIN, S.Pd NIP. 19630601 199403 1 002	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahan utama, yaitu:

1. kurangnya komitmen dan dukungan dalam Penerapan SPM sejak dari tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. kurang didukung oleh SDM yang berkompotensi dalam penerapan SPM;
3. Keberhasilan penerapan SPM sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah Solusi sebagai langkah langkah penyelesaian permasalahan yang diatas, yaitu:
  1. Dibutuhkan komitmen dan dukungan dalam Penerapan SPM sejak dari tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  2. Ketersediaan SDM yang berkompotensi dalam penerapan SPM;

## 4.2 URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota	Penerima Pelayanan Dasar
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Setiap Warga Negara
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Setiap Warga Negara



#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100 %	2021
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %	2021

*Sumber: Permendagri No.100 tahun 2018 Tentang penerapan SPM*

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi, yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KOTA KOTA JAMBI				37.15%
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			71.02%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
		606200	574025	32175	94.69%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	47.35%
		(1)	(2)	(3)	
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	606200	445330	160870	73.46%
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	606200	128696	477504	21.23%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			3.28%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
		606200	29835	576365	4.92%

	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	1.64%
	(1)	(2)	(3)	
1 . Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	606200	14120	592080	2.33%
2 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	0	0	0	0%
3 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	606200	15715	590485	2.59%

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi tahun 2021 terdapat didalam Program sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. dalam penerapan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi		Sumber Dana	
		Rp.	K	Rp.		%
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	56,858,002,845		35,674,666,000	62.74%	APBD dan DAK
	<b>KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	56,858,002,845		35,674,666,000	62.74%	APBD dan DAK
	<b>SUB KEGIATAN Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</b>	56,858,002,845		35,674,666,000	62.74%	APBD dan DAK
1	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	300,000,000	70 SR	289,700,000	96.57%	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi HDPE Jl. Kayat	343,003,245	702 M <sup>1</sup>	322,000,000	93.88%	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi HDPE Wilayah Kenali Asam Kec. Kotabaru	700,000,000	1246 M <sup>1</sup>	657,966,000	94.00%	APBD
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Payo Lebar (Kecamatan Jelutung, Desa Payo Lebar) (DAK Air Minum)	5,514,999,600	5700 M <sup>1</sup> 500 SR	5,155,000,000	93.47%	DAK
5	Peremajaan Pipa PDAM	50,000,000,000	14300 M <sup>1</sup>	29,250,000,000	58.50%	APBD
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	3,550,000,000		3,517,751,000	99.09%	APBD dan DAK
	<b>KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	3,550,000,000		3,517,751,000	99.09%	APBD dan DAK
	<b>SUB KEGIATAN Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</b>	3,550,000,000		3,517,751,000	99.09%	APBD dan DAK
1	Pembangunan Tangki Septik Hibah Air Limbah Setempat	1,600,000,000	310 SR	1,567,751,000	97.98%	APBD
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Lebak Bandung (DAK)	325,000,000	50 SR	325,000,000	100%	DAK
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Mudung Laut (DAK)	325,000,000	50 SR	325,000,000	100%	DAK

No	Uraian	Target	Realisasi		Sumber Dana	
		Rp.	K	Rp.		%
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Olak Kemang (DAK)	325,000,000	50 SR	325,000,000	100%	DAK
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Rawasari (DAK)	325,000,000	50 SR	325,000,000	100%	DAK
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Tahtul Yaman (DAK)	325,000,000	50 SR	325,000,000	100%	DAK
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Wijayapura (DAK)	325,000,000	50 SR	325,000,000	100%	DAK
<b>TOTAL ( I + II )</b>		<b>60,408,002,845</b>		<b>39,192,417,000</b>	<b>64.88%</b>	

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 bersumber dari APBD Kota Jambi yang terdiri sumber DAK dan Non DAK seperti tabel dibawah :

No	Uraian	Target	Realisasi		Sumber Dana
		Rp.	Rp.	%	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	51,343,003,245	30,519,666,000		APBD
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,600,000,000	1,567,751,000		APBD
I		<b>52,943,003,245</b>	<b>32,087,417,000</b>	<b>60.61%</b>	<b>APBD</b>
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5,514,999,600	5,155,000,000		DAK
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,950,000,000	1,950,000,000		DAK
II		<b>7,464,999,600</b>	<b>7,105,000,000</b>	<b>95.18%</b>	<b>DAK</b>
<b>TOTAL ( I + II )</b>		<b>60,408,002,845</b>	<b>39,192,417,000</b>	<b>64.88%</b>	

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2021

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai di bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Bidang Cipta Karya	Golongan			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Kepala Bidang Cipta Karya			1		1
2	Kasi Air Bersih		1			1
3	Kasi PLP/P		1			1
4	Pelaksana Seksi Air Bersih	1	1		6	8
5	Pelaksana Seksi PLP/P	3	5		8	16
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>27</b>

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang Cipta Karya	IV/a	1
2	Kasi Air Bersih	III/d	1
3	Kasi PLP/P	III/c	1
4	Pelaksana Seksi Air Bersih	II/c	1
		III/b	1
5	Pelaksana Seksi Air Bersih (staf PTT)	-	6
		III/b	1
		III/a	4
	Pelaksana Seksi PLP/P	II/c	3
		-	8
<b>Jumlah</b>			<b>27</b>

No	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non Teknik	Jumlah
1	S2		2	2
2	S1	7	9	16
3	D3	5	1	6
4	SMK	1		1
5	STM	1		1
6	SMA		1	1
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>27</b>

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi beserta solusi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

##### Permasalahan :

- a) Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan
- b) karena terbatas anggaran / APBD;
- c) Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan keg
- d) iatan;
- e) Belum sinerginya upaya implementasi SPM

##### Solusi

- a) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan aplikasi realisasi pelaksanaan di sektor SPM
- b) Akan lebih diupayakan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencari sumber-sumber dana yang lainnya terutama dana tugas perbantuan
- c) Meningkatkan kompetensi SDM yang sudah ada agar meningkat keterampilan teknis yang mumpuni
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi validasi pendataan di sektor SPM dengan OPD terkait

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

## 4.3 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Penerima Pelayanan Dasar
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Warga Korban Bencana
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Warga Terdampak Relokasi

### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam mencapai selama kurun waktu tertentu. Berikut adalah tabel target pencapaian standar pelayanan minimal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	Setiap Tahun

#### 4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selama 1 Tahun anggaran. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021 belum melaksanakan Target Capaian SPM yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sehingga realisasi pencapaian SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 0% (nol persen).

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	0%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Jumlah Warga Negara yang	100%	0%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
	bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2021 belum mengalokasikan untuk kegiatan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagai berikut : Yang terdiri dari :

<b>STATUS PEGAWAIAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3	4
Pegawai Negeri Sipil	23	12	35
Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
Honor Daerah	1	-	1
Pegawai Kontrak (TKK, PTT)	23	16	39
Pekerja Harian Lepas	43	3	46
<b>JUMLAH</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>121</b>

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN RUANG</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>
2	I/a	-	-	-
3	I/b	-	-	-
4	I/c	-	-	-
5	I/d	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
6	II/a	-	-	-
7	II/b	1	-	1
8	II/c	4	1	5
9	II/d	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
10	III/a	-	1	1
11	III/b	1	1	2

NO	GOLONGAN RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
12	III/c	6	5	11
13	III/d	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
14	IV/a	4	2	6
15	IV/b	-	1	1
16	IV/c	-	-	-
17	IV/d	-	-	-
18	IV/e	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi beserta solusi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

Permasalahan :

- a. Jenis Pelayanan Dasar di SPM tahun 2021 belum dilaksanakan
- b. Terbatasnya anggaran/APBD
- c. Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan SPM
- d. Sesuai Renstra 2018 – 2023, DPRKP hanya melaksanakan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana

Solusi :

- a. Mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencari sumber dana agar pelaksanaan SPM dapat terwujud
- b. Membentuk dan meningkatkan kompetensi SDM yang mumpuni
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi validasi pendataan di sektor SPM dengan OPD terkait

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target

pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

## 4.4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### A. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial. Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah penyelenggaraan urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting

mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan suburusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara factual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

#### **4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100% hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga Negara. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya. Perangkat daerah yang belum mencapai target 100% wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini. Daerah yang telah mencapai target 100% wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

- a. Langkah Kegiatan
  1. Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran
  2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran

3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
  4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
  5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran
- b. Standar Jumlah dan Kualitas Barang
1. Disetiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift)
  2. Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur
  3. Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- c. Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia
1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
  2. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
  3. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :



**Target SPM pada RPJMD yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah Kota Jambi dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2021**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Langkah Kegiatan	Kegiatan	Anggaran
Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kota	100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan potensi ancaman bencana bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (mitigasi)</li> <li>Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan kepada masyarakat dan dunia usaha</li> <li>Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha</li> <li>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran</li> <li>Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi</li> <li>Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha</li> <li>Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran</li> <li>Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</li> <li>Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</li> <li>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sapras Kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota</li> <li>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ol>	<p>Rp. 32.162.130.-</p> <p>Rp. 6.671.360.-</p> <p>Rp. 91.551.450.-</p> <p>Rp. 51.989.774.-</p> <p>Rp. 853.311.380.-</p>
	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> )	16 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan inventarisasi potensi dari bahaya kebakaran</li> <li>Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangka WMK</li> <li>Melakukan identifikasi sarana dan prasarana pada daerah rawan kebakaran</li> <li>Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)</li> <li>Melakukan kesiapsiagaan satgas damkar</li> <li>Pengadaan alat-alat komunikasi</li> <li>Mengadakan pelatihan simulasi rutin teknis operasi bagi satgas pemadam</li> <li>Melakukan simulasi standar operasional prosedur koordinasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Pascabencana Kab/Kota</li> <li>Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana kab/Kota</li> <li>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<p>Rp. 12.349.530.-</p> <p>Rp. 157.961.742.-</p> <p>Rp. 4.110.886.523.</p>
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pelatihan penangan Binatang Buas dan berbahaya lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diklat penangan Binatang Buas dan berbahaya</li> </ol>	1. Rp.13.163.478,-
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan rescue lainnya</li> <li>Penyediaan garasi dan bengkel mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan rescue lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</li> </ol>	1.Rp. 0,-

--	--	--	--	--	--

#### 4.4.3 Realisasi

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan:

##### **Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran**

a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

i. Rumus

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

---

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2021

X 100%

b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

i. Rumus

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

---

Jumlah kejadian kebakaran di kota Jambi pada Tahun 2021

x 100 %

c) Capaian SPM adalah (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan). Ditambah (Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan/atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah).

1) Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

a) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

i. Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota Jambi dalam tahun X.

ii. Satuan Indikator Jumlah dan Jenis

**Perhitungan**

Selama Tahun 2021, pada Kota Jambi terjadi 50 kali kebakaran pemukiman/perumahan dan lahan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) sebagai berikut :

1.	5 Menit	:	1 Kali Kejadian
2.	6 Menit	:	3 Kali Kejadian
3.	7 Menit	:	1 Kali Kejadian
4.	8 Menit	:	2 Kali Kejadian
5.	9 Menit	:	1 Kali Kejadian
6.	10 Menit	:	9 Kali Kejadian
7.	11 Menit	:	1 Kali Kejadian
8.	12 Menit	:	4 Kali Kejadian
9.	13 Menit	:	1 Kali Kejadian
10.	14 Menit	:	1 Kali Kejadian
11.	15 Menit	:	8 Kali Kejadian
12.	16 Menit	:	3 Kali Kejadian

Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran adalah 164 (Seratus Enam Puluh Empat) Kepala Keluarga. Petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan pertolongan dan penyelamatan terhadap 70 (Tujuh Puluh) kepala keluarga. Ada 2 (dua) korban yang meninggal dunia.

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran (*assessment*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp.3.786.100.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2021 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 161 kali (seratus enam puluh satu) , terdiri dari penanganan bencana banjir 1 (satu) kali, penanganan Rumah Roboh 0 (nol) kali, angin putting beliung 0 (nol) kali, evakuasi korban tenggelam 1 (satu) kali, evakuasi dari binatang berbahaya 136 (seratus tiga

puluh enam) kali, penyelamatan warga dari pohon tumbang 0 (nol) kali dan evakuasi korban lainnya 21 (dua puluh satu) kali.

Cara menghitung capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- ✓ Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi = 50 (lima puluh empat) kejadian..
- ✓ Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam waktu tanggap = 35 (tiga puluh sembilan) kejadian
- ✓ Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 3 Kejadian
- ✓ Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran = 15 (lima belas) kejadian
- ✓ Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 161 kali, terdiri dari penanganan bencana banjir 1 (satu) kali, penanganan Rumah Roboh 0 (nol) kali, angin putting beliung 0 (nol) kali, evakuasi korban tenggelam 1 (satu) kali, evakuasi dari binatang berbahaya 136 (Sembilan puluh tujuh) kali, penyelamatan warga dari pohon tumbang 0 (nol) kali dan evakuasi korban lainnya 21 (delapan belas) kali.

Penghitungan layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan layanan penunjang capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

$$\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Jambi dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi} \\ = \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{35}{50} \times 100\% \\ = 70.00 \%$$

- b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan (Balakar dan/atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

$$\text{Jumlah layanan pemadaman di Kota Jambi Tahun 2021 dalam tingkat waktu tangga (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah} \\ = \frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi Tahun 2021}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{50} \times 100\%$$

$$= 5.5 \%$$

Capaian layanan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Jambi adalah = 70.00% + 0.00 % = 70.00 %

## 2. Layanan Penunjang Capaian SPM

a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Jambi dalam Tahun 2021 = 161 (seratus enam puluh satu) kali layanan yang terdiri dari:

- a) Penanganan bencana banjir 1 (satu) kali
- b) Penanganan Rumah Roboh 0 (nol) kali
- c) Angin puting beliung 0 (dua) kali
- d) Evakuasi korban tenggelam 1 (satu) kali
- e) Evakuasi dari binatang berbahaya 97 (Sembilan puluh tujuh) kali
- f) Penyelamatan warga dari pohon tumbang 0 (nol) kali
- g) Evakuasi korban lainnya 136 (seratus tiga puluh enam) kali.

Dari data diatas, penulisan pelaporan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah:

- 1) Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2021 adalah 70.00% (tujuh puluh koma nol nol persen).
- 2) Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) sejumlah 161 (seratus enam puluh satu) kali terdiri dari:
  - a) Penanganan bencana banjir 1 (satu) kali
  - b) Penanganan Rumah Roboh 0 (nol) kali
  - c) Angin puting beliung 0 (nol) kali
  - d) Evakuasi korban tenggelam 1 (satu) kali
  - e) Evakuasi dari binatang berbahaya 136 (Seratus tiga puluh enam) kali
  - f) Penyelamatan warga dari pohon tumbang 0 (nol) kali
  - g) Evakuasi korban lainnya 136 (seratus tiga puluh enam) kali.
- 3) Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan adalah 164 (seratus enam puluh empat) orang, terdapat 2 korban mengalami luka bakar dan luka fisik lainnya.
- 4) Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa target pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran sebesar 100% (seratus persen) belum tercapai. Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini.

Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasi dan kinerja, serta terus meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas layanan dari tahun ke tahun.

#### **4.4.4 Alokasi Anggaran**

Rencana dan Program merupakan salah satu langka implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2021 dengan merencanakan 3 (tiga) Program dengan 30 Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi E-Planing Bappeda Kota Jambi.

Adapun program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tersebut adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penanggulangan Bencana
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Adapun program yang tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan rencana kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- h. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- i. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Adapun Kegiatan yang tersebut diatas diuraikan dalam bentuk subkegiatan yang merupakan rencana kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keunagan SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Fasilitas Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
17. Pengadaan Mebel
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19. Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota
24. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota
25. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
26. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota
27. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota
28. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota
29. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi kebakaran
30. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

**Anggaran Program dan Kegiatan  
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Tahun 2021**

<b>NAMA PROGRAM//KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp)</b>	<b>Target Fisik Keuangan</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>7.938.838.363</b>	<b>93.26</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.999.286</b>	<b>75.71</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.927	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	299.904	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	199.936	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	499.807	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	999.801	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.499.911	62.64
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.434.023.145</b>	<b>96.51</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.192.523.436	96.49
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	239.999.881	97.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.499.828	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>969.797.761</b>	<b>83.65</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	26.629.470	100
Penyediaan Peraltan dan Perlengkapan Kantor	173.528.660	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	527.287.830	99.94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.199.801	85.61
Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	44.74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.152.000	27.83



<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>116.499.991</b>	<b>91.41</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	105.000.000	90.47
Penggadaan Mebel	11.499.991	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>244.600.000</b>	<b>53.97</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	100
Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	243.400.000	53.74
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.918.180</b>	<b>83.32</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.150.000	77.35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.970.000	59.71
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.798.180	93.97
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.075.612.426</b>	<b>78.49</b>
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1,075,612,426</b>	<b>78.49</b>
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	157.961.742	53.46
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	51.989.774	0

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebanyak 205 orang yang terdiri 66 orang PNS dan 139 orang tenaga kerja kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 205 orang tersebut, 16 orang adalah pejabat struktural, 11 Orang Jabatan Fungsional yang meliputi Kategori Keterampilan terdiri dari 1 orang Mahir, dan 7 orang Kategori Keahlian, kategori Keahlian terdiri dari 2 orang Pertama, Serta 1

orang Arsiparis 23 orang pelaksana administrasi dan 16 orang anggota pemadam kebakaran. Selain pegawai juga terdapat Tenaga Kerja Kontrak (TKK) satuan tugas penanggulangan bencana yang berjumlah 139 orang.

**Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi**

No	PEGAWAI	JUMLAH ( ORANG)	%
1.	PNS	66	32 %
2.	Tenaga Kerja Kontrak	139	68 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>205</b>	<b>100 %</b>

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1x24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, libur nasional , ataupun hari besar keagamaan, seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran di Indonesia termasuk di Kota Jambi (Petugas Teknis Lapangan khususnya Bidang Operasional Pemadaman Kebakaran) agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Jam kerja 1 x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih populer dengan anggota pemadam kebakaran.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi jam kerja dibagi menjadi 3 regu yaitu regu 1, regu 2 dan regu 3 dengan sistem piket. Masing-masing regu jam kerjanya 24 jam, dimulai dari jam 07.15 wib s.d. 07.15 wib, kemudian dilanjutkan dengan regu yang berikutnya. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.3

**Pembagian Jam Kerja Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi**

No.	Uraian	Jam Kerja
1	2	3
1	Regu 1	24 Jam (07.15 Wib – 07.15 Wib)
2	Regu 2	24 Jam (07.15 Wib – 07.15 Wib)
3	Regu 3	24 Jam (07.15 Wib – 07.15 Wib)

Selama 30 Hari atau setiap bulannya dilakukan pergantian piket setiap 1 hari kerja yaitu 1 x 24 jam. Pergantian piket ini dilakukan secara otomatis setiap 1 x 24 jam hari kerja dalam setiap bulannya.

- a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang
- a) Berikut ini Kantor dan Pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparaturnya selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (*shift*):
    - a. Markas Komando  
Jl. Hos Cokroaminoto No.113
    - b. UPT Jambi Selatan (Pos Jambi Selatan)  
Jl. Sultan Hasanudin
    - c. UPT Danau Teluk & Pelayangan (Pos Jamkose)  
Jl. KH. M. Saleh
    - d. UPT Jambi Timur ( Pos Jam Tim )  
Jl. Prabu Siliwangi
    - e. UPT Kota Baru ( Pos Kota Baru)  
Jl.Lingkar Selatan
    - f. UPT Alam Barajo  
Jl. Syailendra
  - b) Setiap Pos yang ada diisi dengan 6 Petugas Pemadam sedangkan di Markas Komando ada sekitar 21 petugas pemadam kebakaran yang siaga; dan
  - c) Dilengkapi sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
  - b. Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia
    1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
    2. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparaturnya;
    3. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran,antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan Setiap aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) baik eksternal maupun internal serta Solusi penanganannya sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum berjalan optimal, hal ini dapat terlihat dengan belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Ketidak optimalan ini dapat terjadi karena tidak meratanya Pos Pelayanan Kebakaran, hal ini dapat diminimalisir dengan cara pembangunan Pos Pelayanan Kebakaran disetiap Kecamatan Kota Jambi.
2. Indikator SPM yang kedua yaitu Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 16 menit. Untuk mencapai target Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) tahun 2023 yaitu 15 menit, untuk itu diperlukan pembangunan Posyankar disetiap kecamatan dan kendaraan operasional dalam kondisi prima.
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar merupakan penunjang utama dalam kelancaran operasionalisasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dalam hal ini Indikator ini belum mencapai target yang ditentukan karena belum meratanya pengetahuan dan kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan memaksimalkan atau bahkan menambah Bimbingan Teknis dan Diklat Pemadam, serta dengan mengirim lebih banyak pasukan untuk peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti Diklat Kejuruan yang diselenggarakan oleh Kemendagri atau Pemadam Provinsi DKI Jakarta.
4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter, tahun 2020 penambahan mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 3 unit, ini merupakan akumulasi dari pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Tahun sebelumnya.

## B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yaitu dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum indikator pencapaian Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adalah **“Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum”**.

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kota Jambi berdasarkan amanat Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi Kota Jambi yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan dalam cakupan indikator SPM Satpol PP yaitu **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**.

Program pembangunan daerah dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kota Jambi 2019-2023 dalam cakupan-cakupan yang menjadi indikator SPM Satpol PP sebagaimana dijelaskan diatas. Cakupan indikator kelembagaannya pada tahun 2021 yaitu Program dan Kegiatan Satpol PP Berbasis Indikator SPM Satpol PP Kota Jambi (s/d bulan Desember 2021).

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yaitu dengan jenis pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.

Pada Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan 1 (satu) Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 (satu) indikator SPM.

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

**Target Pencapaian SPM urusan Tramtibumlinmas**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target	Target
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	100%	100%

Anggaran yang dipersiapkan untuk **mendukung SPM** urusan Tramtibum linmas yaitu Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.679.884.700,-
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp. 215.796.100,-

#### 4.2.3 Realisasi

**Realisasi Pencapaian SPM Urusan Tramtibumlinmas Tahun 2021**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian	KET
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	

Capaian indikator SPM Urusan Tramtibumlinmas Kota Jambi Tahun 2021 terhadap target secara umum sudah mencapai target .

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI BELANJA S/D BULAN INI 2020	%	SISA ANGGARAN	KET.
1	3	4	5	6	7	8
	BELANJA LANGSUNG	21,897,491,415	20,987,367,285	95.84%	910,124,130	
	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	17,196,775,315	16,884,550,585	98.18%	312,224,730	
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16,876,215,375	16,577,632,385	98.23%	298,582,990	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	320,559,940	306,918,200	95.74%	13,641,740	
3	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUBERDAYA APARATUR PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	
	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	434,152,000	434,152,000	100%	-	
4	PEMBINAAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	434,152,000	434,152,000	100%	-	
5	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	-	-	-	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,016,203,400	3,418,864,000	85.13%	597,339,400	
6	OPERASI DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM	206,100,000	206,100,000	100%	-	
7	PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM	3,810,103,400	3,212,764,000	84.32%	597,339,400	

	PROGRAM MASYARAKAT	PEMBINAAN	91,277,000	90,825,000	99.50%	452,000	
8	PEMBINAAN KEWASPADAAN DINI		4,580,000	4,580,000	100%	-	
9	BIMBINGAN DAN PENYULHAN		91,277,000	90,825,000	99.50%	452,000	
	PROGRAM SATLINMAS	PEMBINAAN	159,083,700	158,975,700	99.93%	108,000	
10	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI SATLINMAS		104,689,500	104,581,500	99.90%	108,000	
11	PELATIHAN DAN MOBILISASI SATLINMAS		54,394,200	54,394,200	100%	-	

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Secara keseluruhan, di tahun 2020 jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berjumlah 344 orang. Rata-rata tingkat pegawai adalah lulusan SMP s/d Pascasarjana (S-2). Pejabat Struktural sebanyak 17 orang yang memangku jabatan Kepala Seksi/Kasubag sebanyak 11 orang, Sekretaris/Kepala Bidang sebanyak 5 orang dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 orang.

Komposisi status pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terdiri atas TKK (tenaga kerja kontrak) sebanyak 60 orang THL (tenaga harian lepas) sebanyak 174 orang, PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 103 orang dan Office Boy sebanyak 4 orang, Security sebanyak 6 orang. Komposisi tersebut di atas diperlihatkan berikut ini:



**DATA KEADAAN PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG**

**BULAN : DESEMBER 2020**

NO	JABATAN	Ess II		Ess IIIa			Ess IIIb			ESSELOK IV			PNS			PNS			PNS			CPNS			TKK					TKS/THL			JUMLAH
		GOL. IV		Gol. IV		Gol. IV		Gol. III		Gol. III			GOL. III			GOL. II			GOL. I			GOL			SI	D III	SMA	SMP	SD	D III	SMA	SLTP	
		c	b	a	b	a	d	c	d	c	b	d	c	b	a	Id	Ic	Ib	Ia	III	II	I											
1	2	3	4	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14										
1	KEPALA SATUAN POL PP	1																												1			
2	SEKRETARIS		1																											1			
3	KEPALA BIDANG			2		1	1																							4			
4	KEPALA SEKSI			1				4	1	2																				8			
5	KEPALA SUB BAGIAN								3																					3			
6	PELAKSANA ISTAF										1	14	10	7	2	7	2	1				10					5			59			
7	ANGGOTA, SATPAM & OB										1	10	6	15	3	5	1	1				8				34	3		181	268			
<b>JUMLAH PER GOLONGAN</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>42</b>			<b>39</b>			<b>5</b>			<b>60</b>					<b>181</b>			<b>344</b>					
<b>JUMLAH TOTAL KEADAAN PEGAWAI</b>		<b>103</b>																															

Jumlah Keadaan Pegawai

344

**JUMLAH BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PANGKAT/GOLONGAN**

1	Jumlah Pegawai PNS	103															
2	Jumlah Pegawai CPNS	0	<b>PNS</b>			<b>TKK</b>			<b>TKS/THL</b>			<b>PNS BERDASARKAN PANGKAT/GOL.</b>					
3	Jumlah Pegawai TKK	60	<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NO</b>	<b>JUMLAH/ GOL.</b>	<b>NO</b>	<b>JUMLAH/ GOL.</b>		
4	Jumlah Pegawai THL	181	1	S-2	6	1	S-1	18	1	S.1/D-4	181	1	IVc	1	8	II d	21
	<b>JUMLAH</b>	<b>344</b>	2	S-1	48	2	D-3		2	D-3		2	IVb	1	9	III c	5
			3	D-3	2	3	SLTA	39	3	SLTA		3	IIIa	3	10	II b	12
1	PERWIRA	17	3	D-2	1	4	SLTP	3	<b>JUMLAH</b>		<b>181</b>	4	III d	9	11	II a	
2	STAF (PNS)	44	4	SLTA	40	<b>JUMLAH</b>		<b>60</b>	5	III c	3	12	IV d	3			
3	ANGGOTA (PNS)	42	5	SLTP	5				6	III b	26	13	IV c	1			
4	STAF TKK	15	6	SD	1				7	III a	16	14	IV b	2			
5	ANGGOTA TKK	45	<b>JUMLAH</b>		<b>103</b>								<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				<b>103</b>
	ANGGOTA THL	171															
6	THL OB	4															
	THL SECURITY	6															
	<b>JUMLAH</b>	<b>344</b>															

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi	Ket
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	<p>Tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, Peraturan Daerah Kota Jambi.</p> <p>Belum ada penataan / Alokasi tempat untuk berjualan yang jelas.</p> <p>Masih banyaknya kegiatan sosial masyarakat yang tidak melihat peraturan yang berlaku dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dan perlunya peningkatan kinerja pelayanan kantramtibmas</p>	<p>Perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam menegakan/memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, dan diterapkannya peraturan daerah</p> <p>Bekerja sama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan penataan tempat/lokasi berdagang bagi Pedagang Kaki Lima</p> <p>Penyuluhan/sosialisasi perda terhadap masyarakat serta kerjasama dengan aparat lain yang berkepentingan</p>	

## 4.5 URUSAN SOSIAL

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantardiluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelahtanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota jambi

### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase anak terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	100	2021

	terlantar di luar panti	panti		
		Persentase lanjut usia terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	2021
		Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng	100	2021
		Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	100	2021

#### 4.5.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	

	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021

	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase anak terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase lanjut usia terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2021
		Persentase gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	100	2021

	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	2021
		Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng	100	2021
		Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	100	2021

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki anggaran sebesar Rp. 11.221.205.516 ( Sebelas milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi                      Rp. 10.009.542.435
- Belanja Pegawai                      Rp. 4.085.588.819
  - Belanja Barang dan Jasa              Rp. 4.762.040.566
  - Belanja Hibah                          Rp. 297.500.000
  - Belanja Bantuan Sosial                Rp. 864.413.050
- b. Belanja Modal
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin                      Rp. 1.074.158.488
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan                      Rp. 129.756.093
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              Rp. 7.748.500

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan desember 2021, maka diperoleh data sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.009.542.435</b>	<b>9.448.777.466</b>	<b>94,40</b>
1.1	Belanja Pegawai	4.085.588.819	4.028.222.143	98,60
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.762.040.566	4.360.339.823	91,56
1.3	Belanja Hibah	297.500.000	297.142.000	99,88
1.4	Belanja Bantuan Sosial	864.413.050	763.073.500	88,28
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.211.663.081</b>	<b>1.121.788.250</b>	<b>92,58</b>
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.074.158.488	984.692.750	91,67
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.756.093	129.347.000	99,68
2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.748.500	7.748.500	100
	<b>Jumlah</b>	<b>11.221.205.516</b>	<b>10.570.565.716</b>	<b>94,20</b>

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kota Jambi didukung 79 orang, terdiri 38 orang PNS, 41 orang PTT. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	6 Orang	2 Orang	8 Orang
2	Sarjana (S1)/Diploma IV	19 Orang	22 Orang	41 Orang
3	Diploma III	2 Orang	1 Orang	3 Orang
4	Tingkat SLTA	20 Orang	6 Orang	26 Orang
5	Tingkat SLTP	1 Orang	-	1 Orang
6	Tingkat SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>47 Orang</b>	<b>28 Orang</b>	<b>79 Orang</b>

NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (Gol. IV.c)	3 Orang
2	Pembina Tk I (Gol. IV.b)	2 Orang
3	Pembina (Gol. IV.a)	5 Orang
4	Penata Tk. I (Gol. III.d)	17 Orang
5	Penata (Gol. III.c)	1 Orang
6	Penata Muda Tk. I (Gol. III.b)	1 Orang
7	Penata Muda (Gol. III.a)	3 Orang
8		2 Orang

9	Pengatur Tk I (Gol. II.d)	2 Orang
10	Pengatur (Gol. II.c)	-
11	Pengatur Muda Tk. I (Gol. II.b)	1 Orang
12	Pengatur Muda (Gol. II.a) Juru Tk.I (I/c)	1 Orang
13	Pegawai Tenaga Kontrak	41 Orang
<b>JUMLAH</b>		79 Orang

NO	BIDANG TUGAS	ESSELON			PELAKSANA	FUNGSIONAL	TKK	JML
		II	III	IV				
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariats		1					1
3	Kepala Bidang		4					4
4	Kepala Sub Bagian			3				3
5	Kepala Seksi			12				12
6	Fungsional Penyuluh					3		3
7	Fungsional Arsiparis					2		2
8	Staf Pelaksana				12			12
9	Pegawai Tenaga Kontrak						41	41
<b>JUMLAH</b>		1	5	15	12	5	41	79

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2021 antara lain adalah, besarnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di Kota Jambi dan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pembinaan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

Solusi dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan upaya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta melaksanakan kegiatan pelayanan / rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik yang



bersifat pelayanan publik diantaranya, pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maupun pemberian bantuan langsung serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat stimulant untuk usaha ekonomi produktif para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## 4.6 URUSAN KESEHATAN (OK)

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

#### Indikator dan Nilai SPM

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2020	Dinkes Kota Jambi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	2020	Dinkes Kota Jambi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	2020	Dinkes Kota Jambi

4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2020	Dinkes Kota Jambi
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	2020	Dinkes Kota Jambi
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	2020	Dinkes Kota Jambi
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	2020	Dinkes Kota Jambi
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	2020	Dinkes Kota Jambi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	2020	Dinkes Kota Jambi
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	2020	Dinkes Kota Jambi
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	2020	Dinkes Kota Jambi
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	2020	Dinkes Kota Jambi

#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	12.991	100	12.991	100
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	12.400	100	12.400	100
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	12.400	100	12.400	100
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	59.048	100	59.048	100

5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	68.725	100	6.258	9,11
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	75.000	100	75.000	100
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	41.419	100	41.419	100
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	35.000	100	32.210	92.03
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	15.000	100	12.614	84.09
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.000	100	1.250	125
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB				
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	8.785	100	8.785	100
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV				
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	15.054	100	15.054	100

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Jambi berjumlah **Rp. 204.956.885.928,-** dengan rincian sebagai berikut :

1) APBD Kota Jambi	:	Rp. 183.290.784.928,-
2) DAK (DAK FISIK) Bidang Kesehatan	:	Rp. 6.513.677.000,-
3) APBD Provinsi Jambi	:	-
4) APBN (DAK Non Fisik)	:	
BOK	:	Rp. 12.345.553.000,-
AKREDITASI PUSKESMAS	:	Rp. 1.317.821.000,-
JAMPERSAL	:	Rp. 954.563.000,-
DAK BADAN POM	:	Rp. 534.487.000,-
AKREDITASI LABKESDA	:	-

#### 4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2020 sebanyak 101 orang dengan perincian pendidikan formal sebagai berikut :

a. PNS / CPNS	=	76 orang
b. PTT Pusat & Provinsi	=	-
c. PTT Kabupaten (daerah)	=	-
d. Sukwan kategori II	=	-

Jumlah PNS/ CPNS sebanyak 76 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

a) S2	=	19 orang
b) S1	=	34 orang
c) D4	=	orang
d) D3	=	12 orang
e) D2	=	-
f) D1	=	orang
g) SLTA, SMF, SMAK, SPRG, SPK, SPAG	=	11 orang
h) SLTP	=	-
i) SD	=	-

#### 4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan target 100% tiap tahunnya, SPM ini ada 12 indikator, dari 12 indikator ini ada 9 indikator yang memenuhi SPM. Dengan persentase capaian 100%. Ini terlihat di tabel realisasi capaian SPM. Untuk 3 indikator yang tidak memenuhi capaian SPM beserta permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan tentang pembelajaran dari rumah atau daring
- Akibat adanya pembelajaran secara daring maka penjangkaran terhadap anak sekolah tidak dapat dilakukan seperti biasanya
- Kurangnya pembiayaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penambahan kapasitas petugas Puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya untuk sosialisasi dan transportasi
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai

2. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Tingkat pengetahuan, gaya hidup, pola makan dan budaya di tengah masyarakat tidak bisa diubah
- Angka estimasi terlalu tinggi
- Kurangnya kapasitas petugas
- Kurangnya minat masyarakat tentang program pelayanan penderita hipertensi
- Kurangnya pembiayaan untuk kegiatan pelayanan penderita hipertensi

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang :

- Penambahan kapasitas petugas dinas kesehatan dan puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya untuk sosialisasi dan transportasi
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

3. Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Masyarakat kalau tidak diperiksa GDS dan diberi obat mereka tidak mau diskruining FR PTM
- Terbatasnya posbindu kit untuk pemeriksaan FR PTM

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penambahan kapasitas petugas dinas kesehatan dan puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dari seluruh kewenangan wajib dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada daerah, Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, agar terpadu dan terarah Pemerintah Kota Jambi, menjabarkannya kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (RPJM), Rencana Strategis ( Renstra ) dan kebijakan umum Pemerintah Kota Jambi dan selanjutnya dijabarkan lagi didalam Renstra dari masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi ( SKPD ) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Selanjutnya untuk implementasi dari Dokumen Perencanaan yang telah disepakati bersama, maka semua program yang ada di masing – masing SKPD dihimpun dan dibahas secara bersama – sama dan selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).

Untuk merealisasi kegiatan yang telah disusun haruslah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun sumber dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, berbagai unsur tetap melakukan pengawasan dan memantau kegiatan dimaksud, baik dari lembaga pengawas intern maupun pengawas ekstern seperti BPK, Badan Pengawas Kota, DPRD, LSM, masyarakat maupun organisasi lainnya.





# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. BasukiRachmat No. 01 – KotabaruTelp. (0741) 40463-40827 – Fax. (0741) 40032  
JAMBI -KodePos 36128

### PELAPORAN IKK MAKRO KOTA JAMBI TAHUN 2021-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)	Sumber Data
1	2	3	4	5	
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,37	79.12	0.957	Sumber dari BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022
2	Angka Kemiskinan	8,27	9.02	9.069	Sumber dari BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022
3	Angka Pengangguran	10.49	10.66	1.621	Sumber dari BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3.28	3.94	220.122	Sumber dari BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022
5	Pendapatan Per kapita	49183	52140	6.012	Sumber dari BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.342	0.346	1.17	Sumber dari BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2022

an WALIKOTA JAMBI  
Sekretaris Daerah,  
  
**Drs. H. A. RIDWAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661107 198512 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan)